



KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH
DIREKTORAT SEKOLAH MENENGAH ATAS

RENCANA STRATEGIS 2020-2024



REVISI 2022

KATA PENGANTAR

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Direktorat Sekolah Menengah Atas mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang sekolah menengah atas dan pendidikan layanan khusus pada sekolah menengah atas. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Sekolah Menengah Atas menyelenggarakan fungsi penyiapan perumusan kebijakan, penyusunan norma, prosedur, kriteria, pelaksanaan kebijakan penjaminan mutu, fasilitasi penyelenggaraan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang peserta didik, pembelajaran, sarana prasarana, tata kelola dan penilaian pada sekolah menengah atas dan pendidikan layanan khusus pada sekolah menengah atas, serta penyiapan perumusan pemberian izin penyelenggaraan sekolah menengah atas yang diselenggarakan perwakilan negara asing dan sekolah menengah atas kerja sama yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan asing dengan lembaga pendidikan Indonesia dan pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat. Pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut merujuk kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024 yang merupakan dasar perubahan Rencana Strategis Direktorat Sekolah Menengah Atas (SMA) Tahun 2020-2024.

Rencana Strategis sebagai dokumen utama yang memuat visi, misi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta kebijakan, tujuan dan sasaran pembangunan bidang Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), menjadi salah satu pedoman pelaksanaan kinerja organisasi untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Selain itu, Rencana Strategis ini lebih lanjut dijabarkan ke dalam rencana kinerja atau program kerja tahunan yang sekaligus juga menjadi rujukan untuk mengevaluasi capaian program dan kegiatan dalam periode lima tahunan.

Namun demikian, secara periodik Rencana Strategis ini akan direviu untuk disempurnakan dan dilakukan perubahan yang diperlukan terkait dengan kebijakan internal dan capaian target tahunan. Oleh karena itu, semua pihak yang berkepentingan sangat diharapkan berpartisipasi dalam memberikan saran dan masukan yang positif dan relevan dengan tuntutan masyarakat dan perkembangan jaman.

Jakarta, April 2022

Direktur Sekolah Menengah Atas



Dr. Surharhono Arham, M.Si
NIP.196610181992031003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
DAFTAR DIAGRAM.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Kondisi Umum Pendidikan SMA	4
1.1.1 Akses Layanan Pendidikan SMA	4
1.1.1.1 Program Indonesia Pintar.....	6
1.1.1.2 DAK Non Fisik	7
1.1.1.3 DAK Fisik	8
1.1.1.4 Bantuan Pemerintah Unit Sekolah Baru (USB).....	8
1.1.1.5 Bantuan Pemerintah Ruang Kelas Baru.....	9
1.1.2 Mutu dan Relevansi Pendidikan	10
1.1.3 Tata Kelola Pendidikan SMA.....	14
BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN	17
2.1 Visi Direktorat Sekolah Menengah Atas (SMA) Tahun 2020-2024	17
2.1.1 Dukungan Direktorat Sekolah Menengah Atas	17
2.1.2 Tujuan Direktorat Sekolah Menengah Atas	18
2.1.3 Sasaran Program Direktorat Sekolah Menengah Atas	18
2.1.4 Perspektif Kebijakan Direktorat Sekolah Menengah Atas	19
2.2 Tata Nilai Direktorat Sekolah Menengah Atas (SMA).....	22
BAB III ARAH KEBIJAKAN STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN.....	26
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi	26
3.1.1 Arah dan Kebijakan Strategi Nasional	26
3.1.2 Arah dan Kebijakan Strategi Direktorat SMA sebagai Penunjang Strategi Nasional	27
3.1.3 Arah dan Kebijakan Strategi Direktorat SMA Penunjang Strategi Kemdikbudristek	31
3.1.4 Kerangka Regulasi.....	33
3.1.5 Kerangka Kelembagaan.....	36
3.1.6 Reformasi Birokrasi.....	38
BAB IV TARGET KINERJA DAN TARGET PENDANAAN	41
4.1 Target Kinerja	41

4.2 Kerangka Pendanaan	46
BAB V PENUTUP.....	52

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Penerima PIP 2015-2019	6
Tabel 1. 2 Program BOS SMA Tahun 2015 - 2021.....	7
Tabel 1. 3 Alokasi DAK Tahun 2015-2021	8
Tabel 1. 4 Unit Sekolah Baru Tahun 2015 -2019	9
Tabel 1. 5 Ruang Kelas Baru 2015-2019.....	9
Tabel 1. 6 Sekolah dan Siswa Yang Mengikuti Program Kewirausahaan	13
Tabel 1. 7 Pencapaian Siswa Dalam Mengikuti Lomba Internasional	14
Tabel 2. 1 Tujuan Direktorat SMA Tahun 2020 – 2024.....	18
Tabel 2. 2 Program dan Sasaran Program (SP) Direktorat SMA Tahun 2020-2024.....	18
Tabel 3. 1 Kebijakan dan Strategi Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	27
Tabel 3. 2 Kebijakan dan Strategi Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.....	29
Tabel 3. 3 Kebijakan dan Strategi Reformasi Birokrasi Dan Tata Kelola.....	30
Tabel 3. 4 Kerangka Regulasi Pendidikan SMA Tahun 2020-2024.....	34
Tabel 3. 5 8 (Delapan) Area Perubahan.....	39
Tabel 4. 1 Sasaran Strategis, Indikator, dan Target Kinerja Direktorat Jenderal PAUD, Dikdas dan Dikmen.....	41
Tabel 4. 2 Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Direktorat Jenderal PAUD, Dikdas dan Dikmen.....	43
Tabel 4. 3 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat SMA Tahun 2020 - 2021.....	44
Tabel 4. 4 Target IKK Direktorat SMA Tahun 2022-2024	45
Tabel 4. 5 Kerangka Pendanaan Rencana Strategis Direktorat SMA Tahun 2021-2024	46
Tabel 4. 6 Defini Operasional Target Sasaran Program Ditjen Pauddasmen	47
Tabel 4. 7 Defisini Operasional Target Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Dit. SMA	49

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Dimensi-Dimensi Profil Pelajar Pancasila.....	20
Gambar 3. 1 Struktur Organisasi Direktorat SMA	36

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 1. 1 APK SM 2015-2021	5
Diagram 1. 2 Kondisi Peserta Didik SMA Putus Sekolah.....	5
Diagram 1. 3 Pertumbuhan Akreditasi Sekolah.....	10
Diagram 1. 4 Sekolah Penyelenggara UNBK Jenjang SMA/SMALB	11
Diagram 1. 5 Pertumbuhan Indeks Integritas UN.....	11
Diagram 1. 6 Anggaran Pendidikan Pusat dan Daerah Tahun 2015-2021 (triliun rupiah).....	14

BAB I

PENDAHULUAN

Pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan bagian dari komponen pembangunan yang menjadi tumpuan dasar dari berbagai cita-cita bangsa. Hal tersebut tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (RPJPN 2005-2025), Visi Misi Presiden dan RPJMN 2020-2025, dan Visi Indonesia 2045, sebagai berikut:

- Cita-cita dalam Pembukaan UUD 1945 alinea 4 adalah “... memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial...”;
- RPJPN 2005-2025 memiliki visi “...terciptanya manusia yang sehat, cerdas, produktif, dan berakhlak mulia dan masyarakat yang makin sejahtera dalam pembangunan yang berkelanjutan ... persatuan bangsa yang dijiwai oleh karakter yang tangguh dalam wadah NKRI”;
- Dua dari sembilan misi presiden yaitu: Peningkatan kualitas manusia Indonesia dan kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
- Sasaran pembangunan RPJMN 2020-2025 adalah “masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur ... keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing”;
- Serta
- Salah satu dari empat pilar Visi Indonesia 2045 yaitu “Pembangunan Manusia serta Penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi”.

Kemampuan suatu bangsa untuk menjadi sejahtera, cerdas serta berdaya saing di tengah isu globalisasi dan unggul dalam penguasaan inovasi teknologi akan bertumpu pada kualitas sumber daya manusia (SDM). Kualitas SDM ini tidak hanya terbatas pada kecerdasan dan penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan sains, tetapi juga pembangunan SDM yang berakhlak mulia, berkarakter kuat, toleran, mandiri, bernalar kritis, kreatif, dan selalu siap bekerja sama.

Kaitannya dengan upaya nasional dalam pembangunan manusia, perhatian khusus perlu diberikan pada agenda pengarusutamaan kebudayaan. Oleh karena itu, landasan untuk pembangunan SDM tersebut harus melalui pendekatan pemajuan kebudayaan yang sifatnya tidak hanya melestarikan budaya tradisi, tetapi juga memajukannya melalui interaksi antarbudaya untuk memperkaya keanekaragaman yang menyejahterakan, mencerdaskan, dan mendamaikan, sebagaimana Visi Kebudayaan Indonesia 2040, hasil dari Kongres Kebudayaan Indonesia 2018.

Dalam rangka mewujudkan cita-cita yang diharapkan dari pembangunan pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi, maka Kemendikbudristek melalui Direktorat Sekolah Menengah Atas Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen) harus mengelola kesinambungan dari upaya-upaya pembangunan yang telah, sedang dan akan dilakukan. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa urusan bidang pendidikan dan kebudayaan merupakan urusan konkuren, yaitu urusan yang dibagi antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Untuk itu, Direktorat Sekolah Menengah Atas perlu menerjemahkan upaya-upaya tersebut dalam dokumen kebijakan jangka menengah, yakni dalam dokumen Renstra. Dokumen Renstra Direktorat Sekolah Menengah Atas (SMA) dimaksud akan menjadi haluan bagi strategi pembangunan pendidikan jenjang SMA di 34 provinsi dan pemangku kepentingan lainnya.

Dokumen Renstra Direktorat SMA Tahun 2020-2024 ini merupakan penyempurnaan dan penyesuaian menyikapi restrukturisasi fungsi pada Kemdikbudristek. Selain untuk menjabarkan tugas dan kewenangan baru tersebut, penyempurnaan Renstra juga dilakukan untuk mempertajam strategi dan upaya-upaya dalam menanggulangi dampak pandemi Covid-19. Covid-19 yang merebak di awal tahun 2020 telah menyebabkan 60 juta anak usia sekolah tidak dapat melakukan pembelajaran secara optimal di sekolah. Maka, perubahan Renstra ini juga akan membawa upaya-upaya menekan dampak turunnya kualitas belajar siswa yang disebabkan proses belajar mengajar yang tidak optimal selama pandemi. Upaya ini akan dilakukan salah satunya dengan melakukan akselerasi transformasi pendidikan. Transformasi pendidikan ini diharapkan membuka kesempatan bagi semua satuan pendidikan, guru dan peserta didik dapat secara mandiri melakukan proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan.

Renstra Direktorat SMA 2020-2024 ini disusun sesuai dengan pedoman teknis penyusunan Renstra Kementerian/Lembaga yang diatur oleh Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024. Renstra ini lebih mengkristalkan peran Direktorat SMA ke Kementerian dalam mendukung tercapainya visi dan misi Presiden serta Wakil Presiden.

Dalam periode yang lalu (2015—2019), Direktorat SMA telah mengimplementasikan Nawa Cita dalam berbagai program kerja prioritasnya, seperti Program Indonesia Pintar (PIP) serta Penguatan Pendidikan Karakter (PPK). Memasuki periode selanjutnya (2020—2024) sesuai dengan yang diamanatkan presiden dan wakil presiden Republik, pembangunan SDM di Indonesia akan memperhatikan beberapa antisipasi mendasar.

Pertama, SDM Indonesia perlu dipersiapkan untuk menyesuaikan diri selaras dengan perkembangan zaman. Revolusi Industri 4.0 melahirkan masyarakat kreatif dan masyarakat pengetahuan yang akan memunculkan corak ekonomi yang diwarnai oleh kreativitas dan inovasi insani di satu pihak dan “kesenyawaan” ekonomi dan kebudayaan sebagai sistem simbiosis di pihak lainnya (UNESCO, 2005; World Bank, 2007).

Kedua, dampak dari gencarnya pembangunan infrastruktur perlu dimanfaatkan untuk memajukan kehidupan sosial bangsa. Oleh karena itu, diperlukan sebuah rencana strategis (renstra) yang dapat memandu jalannya pembangunan SDM untuk periode 2020—2024 dalam menata dan memaksimalkan bonus demografi yang menjadi kunci tercapainya bangsa maju yang berkeadilan sosial, seperti yang dicita-citakan oleh para Pendiri Bangsa.

Ketiga, pandemi Covid 19 secara masif telah mendorong perubahan signifikan pada proses pendidikan, antara lain satuan pendidikan di hampir seluruh dunia menerapkan moda pembelajaran jarak jauh sehingga percepatan pengimplementasian sistem digital di satuan pendidikan menjadi satu keharusan untuk memastikan peserta didik tetap dapat

terlayani.

Renstra Direktorat SMA ini dijiwai oleh Visi dan Misi Presiden yang juga diacu dalam Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Tahun 2020-2024.

“Mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global”.

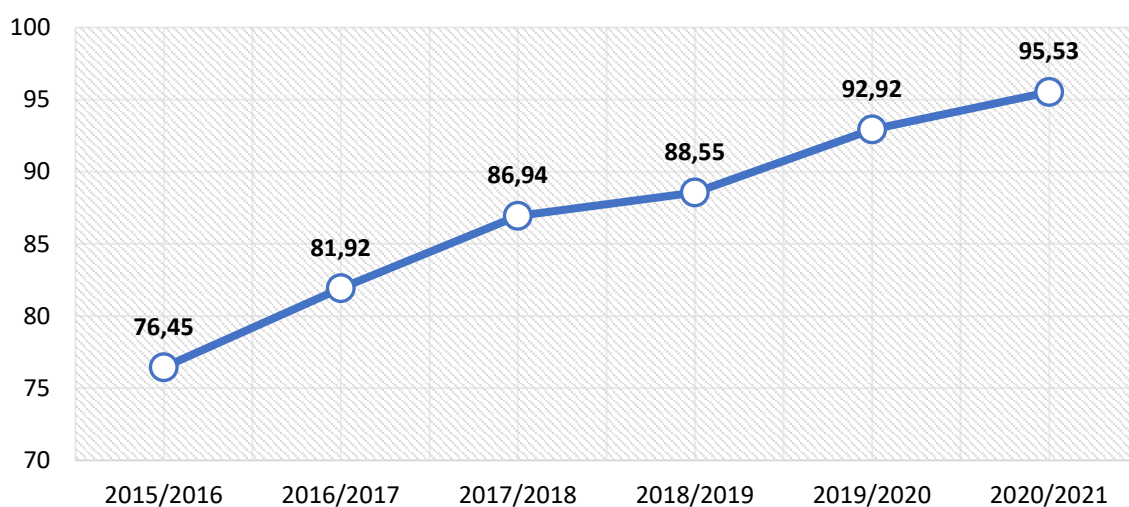
1.1 Kondisi Umum Pendidikan SMA

1.1.1 Akses Layanan Pendidikan SMA

Salah satu indikator yang digunakan untuk melihat kondisi pendidikan SMA di Indonesia adalah ketersediaan akses pendidikan bagi peserta didik tanpa memandang latar belakang dan status ekonomi. Indikator tersebut sejalan dengan Undang – Undang Dasar 1945 pada ayat 31 pasal 1 yang menyatakan bahwa “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”. Direktorat SMA sebagai satuan kerja di Kemendikbud diharapkan mampu untuk menyediakan akses pendidikan jenjang sekolah menengah bagi seluruh rakyat Indonesia. Terdapat 2 (dua) capaian yang dapat digunakan untuk melihat partisipasi masyarakat terhadap pelayanan pendidikan SMA yakni Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Putus Sekolah (APTS). APK SM (Sekolah Menengah) merupakan perbandingan antara jumlah peserta didik di jenjang sekolah menengah dengan penduduk usia 16-18 tahun di wilayah yang sama.

Dalam kurun waktu tahun 2015-2021, berdasarkan data yang diperoleh dari Pusat Data Statistik Pendidikan (PDSPK) yang saat ini sudah bergabung dengan Pustekom menjadi Pusdatin, APK SM mengalami peningkatan dari tahun 2015 – 2021 seperti yang tergambar pada Diagram 1.

APK SM

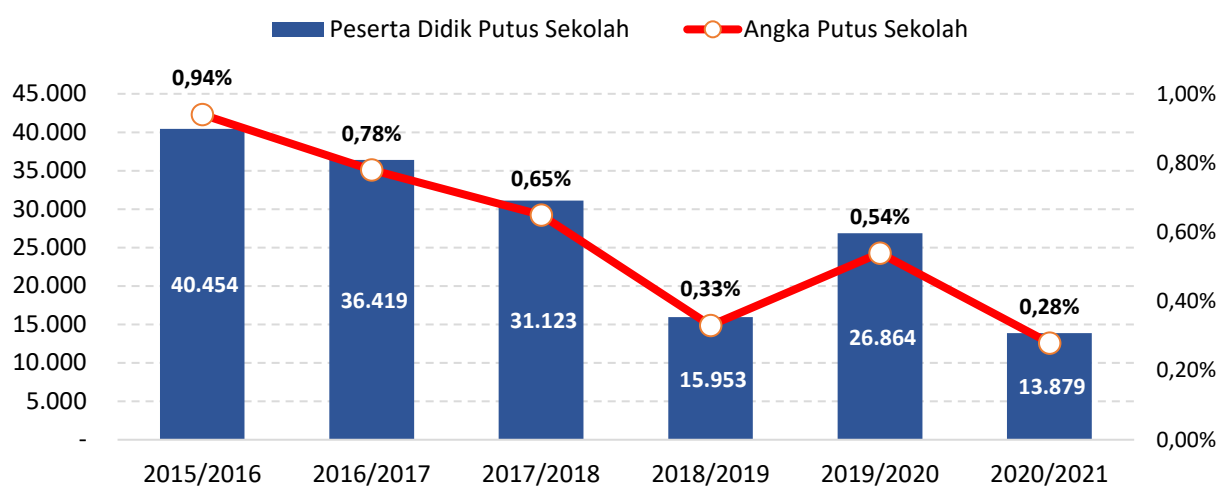


Sumber data : Publikasi Pusat Data dan Teknologi Informasi

Diagram 1. 1 APK SM 2015-2021

Pada tahun ajaran 2015/2016 APK SM berada di angka 76,45. APK SM tersebut mengalami peningkatan setiap tahunnya dan pada tahun ajaran 2020/2021, APK SM berada di angka 95,53. Selain APK, acuan lain yang digunakan untuk mengukur capaian ketersediaan layanan pendidikan adalah angka putus sekolah (APTS). APTS menunjukkan tingkat putus sekolah di suatu jenjang pendidikan. Berdasarkan data yang diperoleh, APTS SMA periode tahun ajaran 2015/2016 hingga 2020/2021 mengalami penurunan.

Kondisi Peserta Didik SMA Putus Sekolah



Sumber data:
Publikasi Pusat Data dan Teknologi Informasi Tahun 2020

Diagram 1. 2 Kondisi Peserta Didik SMA Putus Sekolah

Pada tahun ajaran 2015/2016 APTS berada di angka 0,94%. APTS tersebut mengalami penurunan dan pada tahun ajaran 2020/2021, APTS berada di angka 0,28%. Capaian tersebut telah melebihi target penurunan APTS yang ditetapkan pada renstra yakni sebesar 0,80%.

Berdasarkan kedua hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan akses layanan pendidikan yang memenuhi target pada Renstra Kemendikbud 2015- 2019. Capaian tersebut diperoleh melalui berbagai program yang dilaksanakan oleh Kemendikbud dengan kerjasama yang melibatkan Kementerian/Lembaga lain yang meliputi Program Indonesia Pintar (PIP), Dana Alokasi Khusus (Non Fisik dan Fisik), dan Bantuan Pemerintah yang disalurkan melalui Direktorat SMA dalam bentuk pembangunan Unit Sekolah Baru dan Ruang Kelas Baru. Berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing program tersebut.

1.1.1.1 Program Indonesia Pintar

PIP merupakan salah satu paket kebijakan yang didasarkan pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Keluarga Produktif, bersama dengan Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) dan Program Indonesia Sehat (PIS). Program Indonesia Pintar berbentuk bantuan uang tunai yang diberikan kepada siswa berusia 6 sampai dengan 21 tahun dari keluarga miskin atau rentan miskin dalam membiayai pendidikannya, sehingga mereka dapat mengakses layanan pendidikan sampai menamatkan pendidikan menengah. Pemberian PIP kepada keluarga miskin dan rentan miskin ini adalah untuk mendukung pemerataan layanan pendidikan dalam rangka peningkatan akses pendidikan. Jumlah rata-rata peserta didik penerima PIP dalam kurun waktu tahun 2015-2019 sebanyak 1.5 juta sebagaimana tertuang pada Tabel 1.

Tabel 1. 1 Penerima PIP 2015-2019

No	Tahun	Satuan PIP Per Tahun	Jumlah Siswa	Nilai Bantuan Sosial PIP (Rp)
1	2015	1.000.000	1.638.671	1.353.515.000.000
2	2016	1.000.000	1.655.080	1.345.294.000.000
3	2017	1.000.000	1.520.422	1.241.865.000.000
4	2018	1.000.000	1.516.701	1.193.068.115.634
5	2019	1.000.000	1.464.712	1.191.740.433.000

Program Indonesia Pintar sejak tahun 2020 telah dialihkan kewenangannya yang semula berada di Direktorat SMA berpindah ke Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan, Sekretariat Jenderal.

1.1.1.2 DAK Non Fisik

DAK Non Fisik atau biasa disebut dengan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk mendukung operasional sekolah, menguatkan kemampuan sekolah dalam meningkatkan mutu dan memastikan peserta didik yang tidak mampu, dibebaskan atau diringankan dari pungutan. Melalui bantuan ini sekolah diharapkan memiliki kemampuan untuk memberikan layanan pendidikan menengah kepada peserta didik, termasuk mereka yang berasal dari keluarga tidak mampu. Perhitungan bantuan dana BOS dilakukan berdasarkan jumlah peserta didik di setiap satuan pendidikan. Pada Tahun 2015 jumlah dalam BOS disalurkan dengan dasar perhitungan jumlah siswa 4.391.141 orang dengan unit cost per peserta didik Rp 1.200.000,00.

Pada tahun 2015 dana BOS disalurkan dan dianggarkan di Kemendikbud, namun sejak tahun 2016 dana BOS disalurkan langsung melalui mekanisme transfer daerah dengan mengacu pada data yang diperoleh melalui basis data Dapodikdasmen. Dalam kurun waktu tahun 2015-2021, jumlah dana BOS dan unit cost yang dialokasikan mengalami peningkatan seperti pada tabel berikut :

Tabel 1. 2 Program BOS SMA Tahun 2015 - 2021

No	Tahun	Unit Cost persiswa (Rp)	Jumlah Siswa SMA sebagai Perhitungan Penerima BOS	Nilai BOS (Rp Juta)
1	2015	1.200.000	4.391.141	5.269.369
2	2016	1.400.000	4.338.466	6.073.852
3	2017	1.400.000	4.500.535	5.826.216
4	2018	1.400.000	4.624.078	6.544.731
5	2019	1.400.000	5.041.622	7.058.270
6	2020	1.500.000	4.931.042	7.396.563
7	2021	1.500.000 – 3.470.000	4.808.158	7.758.155

Berdasarkan kebijakan dana BOS tahun 2021, unit cost untuk program BOS menggunakan unit cost majemuk, sehingga dana BOS tahun 2021 terjadi perbedaan unit cost antar daerah. Hal ini ditetapkan berdasarkan pada indeks kemahalan yang berbeda dari setiap kabupaten/kota.

1.1.1.3 DAK Fisik

Dana Alokasi Khusus Pendidikan untuk Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional dalam hal ini adalah bidang pendidikan. Di dalam DAK Fisik terdapat berbagai menu yang dapat digunakan untuk meningkatkan akses layanan pendidikan yakni pembangunan ruang kelas baru. Selain itu terdapat menu yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas bangunan atau fisik dari sekolah yakni rehabilitasi serta pembangunan dan rehabilitasi berbagai bangunan di sekolah yang menunjang proses pembelajaran. Program DAK Fisik ini dilaksanakan dengan melibatkan Kemendikbud, Kemenkeu, Kemendagri, dan Bappenas.

Tabel 1. 3 Alokasi DAK Tahun 2015-2021

Tahun	Reguler	Afirmasi	Jumlah Alokasi DAK Fisik SMA
2015			1.606.608.000.000
2016*			0
2017	1.221.428.000.000		1.221.428.000.000
2018	1.234.221.176.000	166.135.455.000	1.400.356.631.000
2019	1.740.150.710.000	97.877.295.000	1.838.028.005.000
2020	2.645.187.000.000	73.204.479.000	2.718.391.479.000
2021**	2.436.845.368.000		2.436.845.368.000

*Tahun 2016 alokasi hanya untuk jenjang SD

** Tahun 2021 hanya untuk DAK regular

1.1.1.4 Bantuan Pemerintah Unit Sekolah Baru (USB)

Upaya meningkatkan daya tampung peserta didik, Direktorat SMA telah memberikan bantuan dana untuk pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) kepada pemerintah daerah yang memerlukan bantuan penyediaan sekolah menengah di daerah. Bantuan diberikan ke daerah yang belum tersedia satuan pendidikan menengah atau di daerah yang memiliki kekurangan daya tampung. Syarat utama pemberian bantuan adalah ketersediaan lahan oleh pemerintah daerah. Sepanjang 2015-2019 telah dibangun 374 USB di seluruh Indonesia yang mampu menampung peserta didik baru sebanyak 40.392 siswa. Kapasitas ini dihitung berdasarkan ketersediaan tiga ruang kelas baru per USB. Dengan penambahan kapasitas daya tampung ini, diharapkan lulusan SMP/MTs dapat melanjutkan ke SMA terutama di daerah yang selama ini belum tersedia layanan pendidikan SMA. Setiap unit sekolah baru dibangun berupa tiga ruang kelas, satu perpustakaan, satu laboratorium, satu ruang kantor, jamban, dan gudang.

Dengan adanya bantuan USB ini ke depannya diharapkan sekolah dapat mengembangkan kapasitas layanannya melalui dukungan dari pemerintah daerah dan masyarakat. Adapun jumlah USB dibangun tiap tahun adalah sebagai berikut:

Tabel 1. 4 Unit Sekolah Baru Tahun 2015 -2019

No	Tahun	USB Dibangun	Anggaran (RP Juta)	Tambahan Daya Tampung (Jumlah Peserta Didik)
1	2015	70	129.499	7560
2	2016	204	463.925	22.032
3	2017	70	171.515	7.560
4	2018	20	59.468	2.160
5	2019	10	35.475	1.080
Jumlah		364	824.407	40.392

1.1.1.5 Bantuan Pemerintah Ruang Kelas Baru

Salah satu upaya untuk meningkatkan kapasitas daya tampung SMA dalam memberikan layanan pendidikan kepada lulusan SMP/MTs, adalah dengan program pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB). Melalui pembangunan RKB diharapkan daya tampung SMA meningkat. Untuk itu, Direktorat SMA memberikan bantuan kepada sekolah-sekolah yang memiliki potensi untuk menampung peserta didik lebih banyak. Selama periode 2015-2019, Direktorat Pembinaan SMA telah memberikan bantuan untuk membangun 9.082 unit ruang kelas baru yang dapat menampung sedikitnya 326.952 peserta didik baru SMA. Bantuan RKB diberikan hanya sampai tahun 2018. Sedangkan pada tahun 2019 bantuan sejenis disalurkan melalui transfer daerah melalui DAK Fisik. Adapun jumlah ruang kelas baru yang dibangun oleh Direktorat SMA tiap tahun adalah sebagai berikut:

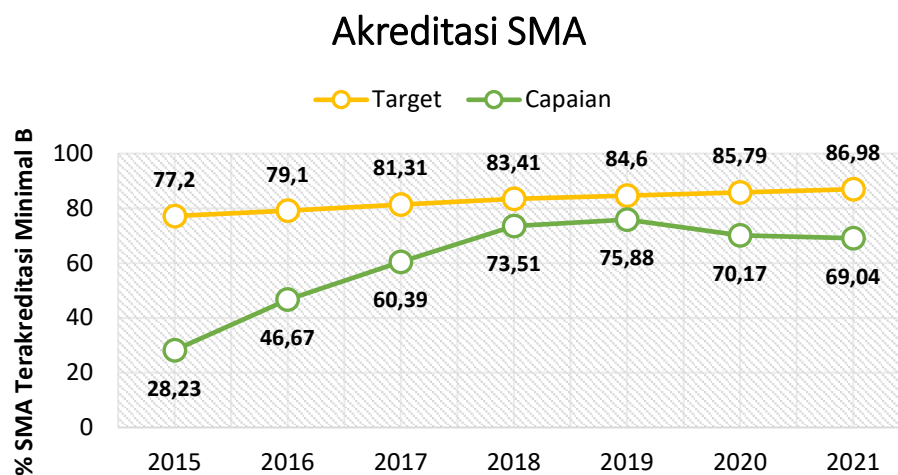
Tabel 1. 5 Ruang Kelas Baru 2015-2019

No	Tahun	RKB Dibangun (Unit)	Anggaran (RP Juta)	Tambahan Daya Tampung (Jumlah Peserta Didik)
1	2015	2153	402.103	77.508
2	2016	4187	402.907	150.732
3	2017	1024	201.799	36.864
4	2018	1718	374.544	61.848
5	2019	-	-	-
Jumlah		9.082	1.781.353	326.952

Sejak tahun 2020 Direktorat SMA tidak lagi menyalurkan bantuan fisik, diantaranya adalah USB, RKB dan bantuan fisik lainnya. Pemberian Bantuan bangunsn fisik akan disalurkan melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

1.1.2 Mutu dan Relevansi Pendidikan

Sejalan dengan pemerataan layanan Pendidikan untuk peningkatan akses Pendidikan, dalam periode 2015 – 2021, pemerataan mutu layanan Pendidikan juga mengalami peningkatan, antara lain, jumlah SMA yang terakreditasi terus bertambah, guru yang tersertifikasi semakin banyak, dan Indeks Integritas Ujian Nasional (IIUN) terus naik. Akreditasi SMA dijalankan oleh BAN S/M untuk sekolah dan madrasah. Akreditasi sekolah untuk jenjang SMA meningkat dari 28,23% di tahun 2015 menjadi 69,04% di tahun 2021.



Sumber data: Dapodik kondisi 31 Desember 2021

Diagram 1. 3 Pertumbuhan Akreditasi Sekolah

Terobosan yang dilakukan dalam memperbaiki kesahihan UN adalah dengan memberlakukan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) yang telah berhasil mendorong naiknya Indeks Integritas Ujian Nasional (IIUN). Dengan UN yang semakin sah dan dapat dipercaya, ukuran mutu pendidikan nasional menjadi semakin jelas. Direktorat SMA berhasil mendorong pengadopsian UNBK di hampir semua sekolah di Tanah Air untuk menggantikan Ujian Nasional Kertas dan Pensil (UNKP). Data yang ditampilkan pada Diagram dibawah menunjukkan peningkatan jumlah satuan pendidikan dan peserta UN yang menggunakan UNBK pada jenjang SMA sederajat.

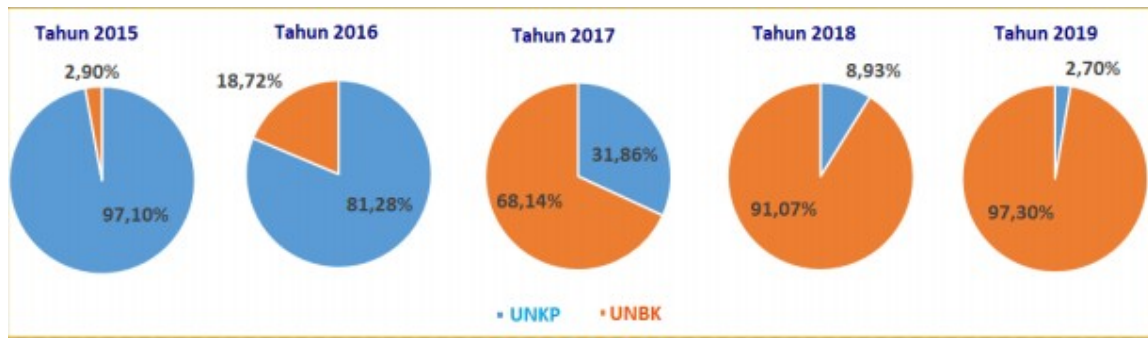
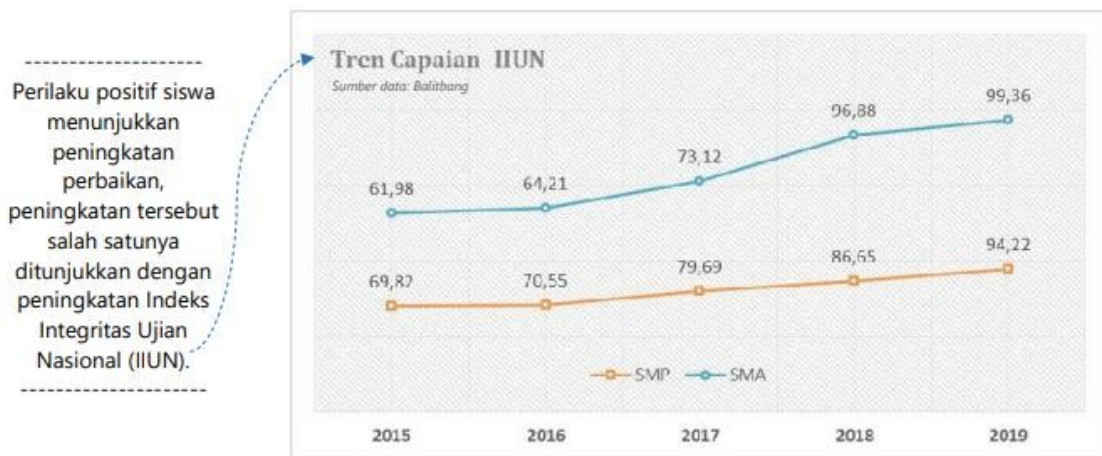


Diagram 1. 4 Sekolah Penyelenggara UNBK Jenjang SMA/SMALB

IA

Sederajat seperti terlihat pada Diagram 1.4. Di tahun 2015, penggunaan UNBK hanya berkisar 2,9% untuk jenjang SMA/SMALB. Pada tahun 2019, pada jenjang SMA/SMALB hanya tersisa 2,7% peserta UN yang tidak menggunakan UNBK. Pada jenjang SMA, persentase penggunaan UNBK juga sudah mencapai 97,3%. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan komputer dan teknologi informasi semakin merata pada sekolah-sekolah Indonesia.

Penggunaan UNBK ini mendukung kampanye gerakan menjunjung tinggi integritas dalam pelaksanaan UN sebagai bagian dari penguatan karakter yang dilakukan Direktorat SMA. Hasil pengukuran integritas pelaksanaan UN ditunjukkan oleh nilai IIUN. Sepanjang periode 2015—2019, IIUN jenjang dan SMA sederajat terus membaik..



Sumber: LKJ Kemendikbud tahun 2019

Diagram 1. 5 Pertumbuhan Indeks Integritas UN

Pada Diagram 1.5 tampak peningkatan IIUN yang tinggi pada jenjang SMA sederajat. Terjadi peningkatan lebih dari 30% dalam kurun waktu 4 tahun dari 2015 ke 2019, sehingga mencapai nilai 99,36%. Peningkatan IIUN di jenjang SMA disebabkan karena penerapan UNBK di jenjang SMA hampir mendekati 100%, dan pada tahun 2019 penerapan UNBK sudah penuh 100% yang berarti IIUN akan menjadi 100% pula.

Perbaikan integritas pelaksanaan UN mengoreksi nilai UN dan memunculkan nilai murni yang bermanfaat dalam merancang intervensi perbaikan mutu untuk tiap sekolah.

Upaya lain yang telah dilakukan untuk mendorong pemerataan mutu adalah pemberlakuan sistem zonasi. Sebelumnya, ketidakmerataan mutu pendidikan dapat disebabkan oleh adanya sekolah favorit dan sekolah tidak favorit dalam satu daerah. Ada kepercayaan bahwa siswa yang terdaftar di satu sekolah favorit akan menikmati layanan pendidikan yang lebih bermutu dibandingkan dengan sekolah yang tidak favorit. Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 berupaya mendorong pemerataan mutu pendidikan dan mengikis pandangan yang salah mengenai sekolah favorit dan tidak favorit.

Peraturan ini mewajibkan sekolah yang diselenggarakan oleh Pemda, kecuali SMK, untuk menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah minimal 50% dari keseluruhan jumlah peserta didik yang diterima. Domisili calon peserta didik tersebut didasarkan pada alamat yang tercantum di kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat 1 tahun sebelum pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB). Pemda menetapkan radius zona terdekat sesuai dengan kondisi daerahnya. Sisa kuota maksimal 15% untuk afirmasi berasal dari siswa kurang mampu, kuota 5 persen untuk siswa yang orang tuanya mengalami perpindahan domisili/mutasi, dan sisa kuota yang ada boleh diberikan untuk jalur prestasi. Dengan sistem zonasi, semua sekolah didorong untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan cara penguatan peran pemangku kepentingan sekolah. Komite Sekolah, Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) atau Kelompok Kerja Guru (KKG) secara keseluruhan bergerak untuk memikirkan cara yang dapat ditempuh untuk memastikan mutu sekolah setempat meningkat. Dengan demikian, orang tua siswa tidak lagi berebut masuk ke sekolah yang dianggap favorit dan alokasi sumber daya dapat dibagikan secara adil bagi setiap sekolah, tidak hanya sekolah favorit. Upaya-upaya tersebut merupakan dilakukan untuk memastikan mutu pendidikan di seluruh Indonesia merata dan pembangunan SDM nasional memiliki mutu yang memadai. Permasalahan tentunya masih dijumpai di tengah usaha-usaha yang telah dikerjakan, sebagaimana dijelaskan selanjutnya.

Terkait dengan pelaksanaan Ujian Nasional sejak tahun 2020 sudah ditiadakan. Pada tahun 2021 dilaksanakan program Asesmen Nasional (AN) sebagai upaya perbaikan program UN, AN lebih fokus pada kompetensi dasar literasi, numerasi, dan sains. Tujuan

utamanya adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan mengevaluasi kinerja satuan pendidikan dan sekaligus menghasilkan informasi untuk perbaikan kualitas belajar-mengajar, yang kemudian diharapkan berdampak pada karakter dan kompetensi siswa

Kemendikbudristek melalui Direktorat SMA juga berupaya mengembangkan strategi untuk menemukan praktik-praktik dari pemerintah daerah yang menunjukkan peningkatan untuk kemudian dapat diadopsi dan diadaptasi oleh daerah lain sesuai dengan konteks dan kebutuhan tiap-tiap daerah.

Untuk memastikan peningkatan kemampuan siswa lulusan SMA memasuki jenjang pendidikan berikutnya ataupun memasuki dunia kerja, upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Direktorat SMA untuk memastikan kemampuan lulusan SMA yang relevan dengan kebutuhan adalah melalui program kewirausahaan, pengembangan karakter dan minat bakat peserta didik, serta pembinaan ekstrakurikuler. Adapun capaian program tersebut adalah sebagai berikut.

1) Siswa Mengikuti Program Kewirausahaan

Program Kewirausahaan mulai diterapkan di sekolah pada tahun 2016 dengan jumlah sekolah sebanyak 818 sekolah sebagai rintisan yang melibatkan kelas X dan kelas XI rata-rata 242 Siswa. Pada tahun berikutnya program ini diperbaiki dengan melakukan optimalisasi jumlah sekolah yang dibina. Setiap tahun 204 sekolah menjadi sasaran pembinaan program kewirausahaan, yang melibatkan rata-rata 241 siswa/tahun. Selama periode 2015-2019 telah dilakukan pembinaan pada 1.430 sekolah yang melibatkan 348.774 siswa. Secara rinci dapat dilihat di tabel berikut :

Tabel 1. 6 Sekolah dan Siswa Yang Mengikuti Program Kewirausahaan

No	Tahun	Jumlah SMA yang melakukan pembelajaran Kewirausahaan	Jumlah siswa SMA yang Kewirausahaan
1	2015	-	-
2	2016	818	201.318
3	2017	204	48.999
4	2018	204	48.894
5	2019	204	49.563
Jumlah		1430	348.774

Sasaran pembinaan program kewirausahaan pada tahun 2020 sebanyak 114 SMA. Pada tahun 2021, bantuan program kewirausahaan diberikan kepada 12 yayasan serta 34 SMA.

2) Siswa Mengikuti Lomba Internasional

Selain melalui program kewirausahaan, peningkatan kemampuan lulusan SMA juga dapat dilakukan melalui pengembangan minat dan bakat peserta didik, melalui lomba di tingkat Internasional. Hal ini bisa dilihat dari jumlah medali yang diperoleh dalam lomba tingkat Internasional yang terus mengalami peningkatan sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 1. 7 Pencapaian Siswa Dalam Mengikuti Lomba Internasional

No	Tahun	Jumlah Lomba/Event	Jumlah Peserta	Emas	Perak	Perunggu	Jumlah Medali
1	2015	12	57	12	23	18	53
2	2016	12	51	6	14	23	43
3	2017	12	49	10	16	19	45
4	2018	14	61	12	20	17	49
5	2019	9	41	7	20	12	39
Jumlah		59	259	47	93	89	229

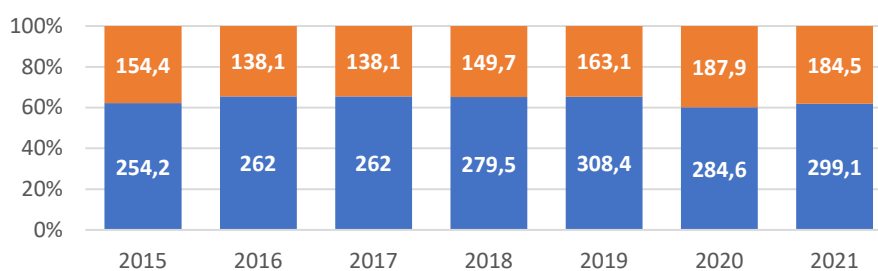
Sejak tahun 2020 Direktorat SMA tidak lagi menyelenggarakan lomba/olimpiade. Pelaksanaan Lomba dan olimpiade dialihkan pada unit kerja Pusat Prestasi Nasional, Sekretariat Jenderal Kemendikbudristek.

1.1.3 Tata Kelola Pendidikan SMA

Salah satu hal kunci dalam tata kelola pendidikan adalah bahwa urusan pendidikan merupakan salah satu urusan yang kewenangannya dilimpahkan ke daerah. Pasal 31 ayat 4 UUD 1945 Amandemen ke 4 mengamanatkan bahwa 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dialokasikan untuk pendidikan, untuk saat ini lebih dari 60% anggaran pendidikan tersebut merupakan anggaran yang dikelola oleh daerah.

Direktorat SMA sebagai bagian dari kementerian teknis di bidang pendidikan terus mengembangkan mekanisme tata kelola untuk meyakinkan daerah agar menggunakan anggaran pendidikan yang dikelolanya untuk mendukung program prioritas pemerintah.

Diagram 1. 6 Anggaran Pendidikan Pusat dan Daerah Tahun 2015-2021 (triliun rupiah)



Sumber :
Perpres Tentang Rincian APBN
2015-2021

■ Pusat ■ Daerah

Terdapat berbagai instrumen yang dapat digunakan untuk mengelola dana transfer ke daerah, diantaranya adalah Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan untuk tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU dikelola sebagai unconditional transfer untuk menutup kesenjangan kapasitas fiskal daerah. Untuk DAU pendidikan, sebagian besar dana ($\pm 80\%$) digunakan untuk belanja gaji bagi guru, tenaga pendidikan, serta aparat organisasi perangkat daerah di bidang pendidikan. Kondisi ini menyebabkan keterbatasan pusat untuk mempengaruhi daerah dalam mengelola pembelanjaan DAU.

Oleh karena itu digunakan Kebijakan DAK untuk mengendalikan belanja pendidikan di daerah. DAK adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Kebijakan DAK dibagi menjadi dua yaitu DAK fisik dan DAK non fisik. DAK fisik adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan bersesuaian dengan program prioritas nasional seperti rehabilitasi, penambahan fasilitas, dan pembelian aset pendukung pembelajaran. Sementara itu, DAK non fisik digunakan untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan BOP PAUD/Kesetaraan.

Selanjutnya, untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien, Ditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen juga menerapkan pelaksanaan reformasi birokrasi yang mencakup delapan area, yakni manajemen perubahan, penataan peraturan perundangan/deregulasi kebijakan, penataan organisasi/kelembagaan, penataan tatalaksana, sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, pengawasan, serta pelayanan publik.

Salah satu potensi untuk meningkatkan Indeks Reformasi Birokrasi dan layanan publik Kemendikbudristek dapat dilakukan dengan mengembangkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi tata kelola, seperti: otomatisasi persuratan, pengadaan barang dan jasa, dan proses kepegawaian, serta penguatan layanan publik melalui ULT untuk mengakomodasi layanan informasi dan pengaduan.

Selain Indeks Reformasi Birokrasi, tingkat capaian reformasi birokrasi juga didukung dengan penetapan Direktorat SMA sebagai Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI/WBK) di tahun 2021. Capaian itu tidak lepas dari upaya-upaya yang telah

dilakukan yaitu (1) sosialisasi dan fasilitasi terkait peningkatan delapan area perubahan kepada seluruh Satker serta pendampingan pembangunan ZI-WBK, (2) fasilitasi pelayanan prima bagi petugas pemberi pelayanan publik, serta (3) penguatan agen perubahan melalui penyelenggaraan forum agen perubahan secara berkala, pelaksanaan rencana aksi agen perubahan di unit kerja terkait.

Sementara sebagai sistem pertanggungjawaban kinerja secara keseluruhan maka Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) juga telah dilaksanakan. Yang dimaksud dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai komponen, alat, dan prosedur yang dirancang untuk mencapai tujuan manajemen kinerja yaitu perencanaan, perjanjian kinerja dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan laporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja.

Tujuan dari pelaksanaan SAKIP adalah:

1. Perencanaan lebih berorientasi kinerja dengan skenario evaluasi keberhasilan;
2. Pelaporan lebih berorientasi pada hasil dan sesuai tanggung jawab pada tingkatan unit pelapor;
3. Menyelaraskan dan pengintegrasian manajemen keuangan dan manajemen kinerja (penganggaran berbasis kinerja);
4. Mendorong pimpinan melakukan monitoring dan pengendalian.

Berdasarkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja, tingkat penerapan akuntabilitas kinerja SAKIP tahun 2021, Direktorat SMA masuk dalam kategori A (rentang predikat terbaik AA s.d terbawah predikat D) nilai: 84,70 dengan interpretasi: memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel.

BAB II

VISI, MISI DAN TUJUAN

2.1 Visi Direktorat Sekolah Menengah Atas (SMA) Tahun 2020-2024

Sebagai Direktorat Teknis yang mengemban amanat dalam memajukan pembangunan SDM khususnya pada pendidikan menengah, melalui usaha bersama semua anak bangsa untuk meningkatkan mutu pendidikan, memajukan kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi, Direktorat SMA menentukan visi berdasarkan visi Ditjen Paudasmen dan Kemdikbudristek, Visi Presiden pada RPJMN Tahun 2020-2024, serta Visi Indonesia 2045 dalam pencapaian kinerja, potensi dan permasalahan. Adapun Visi Kemdikbudristek 2020-2024 adalah:

Direktorat SMA mendukung Visi dan Misi Presiden untuk mewujudkan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global

Visi tersebut di atas menggambarkan komitmen Direktorat SMA, Kemdikbudristek mendukung terwujudnya visi dan misi Presiden melalui pelaksanaan tugas dan kewenangan yang dimiliki secara konsisten, bertanggung jawab, dapat dipercaya, dengan mengedepankan profesionalitas dan integritas. Oleh karena itu, perumusan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan bidang pendidikan dan kebudayaan akan mengedepankan inovasi guna mencapai kemajuan dan kemandirian Indonesia. Sesuai dengan kepribadian bangsa yang berlandaskan gotong royong, Direktorat SMA dan seluruh pemangku kepentingan pendidikan dan kebudayaan, bekerja bersama untuk memajukan pendidikan dan kebudayaan sesuai dengan Visi dan Misi Presiden tersebut.

2.1.1 Dukungan Direktorat Sekolah Menengah Atas

Untuk mendukung pencapaian Visi Presiden, Direktorat SMA sesuai tugas dan kewenangannya, melaksanakan Misi Presiden yang dikenal sebagai arahan presiden, yaitu

Menjabarkan misi nomor (1) Peningkatan kualitas manusia Indonesia; nomor (8) Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya. Untuk itu, misi Ditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen, Kemdikbudristek dalam melaksanakan Nawacita kedua arahan presiden (RPJMN) tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Pendidikan Menengah yang relevan dan berkualitas tinggi, merata dan berkelanjutan, didukung oleh infrastruktur dan teknologi.
2. Mengoptimalkan peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan dasar dan Pendidikan Menengah.

2.1.2 Tujuan Direktorat Sekolah Menengah Atas

Perumusan tujuan Direktorat SMA ditujukan untuk menggambarkan ukuran-ukuran terlaksananya misi dan tercapainya visi. Direktorat SMA menetapkan tiga tujuan sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.1

Tabel 2. 1 Tujuan Direktorat SMA Tahun 2020 – 2024

No	Tujuan
1	Perluasan akses Pendidikan Menengah bermutu bagi peserta didik yang berkeadilan dan inklusif
2	Penguatan mutu dan relevansi Pendidikan Menengah yang berpusat pada perkembangan peserta didik yang berkarakter
3	Penguatan sistem tata kelola Pendidikan Menengah yang partisipatif, transparan, dan akuntabel

2.1.3 Sasaran Program Direktorat Sekolah Menengah Atas

Dalam rangka mengukur tingkat ketercapaian tujuan pembangunan Direktorat SMA, diperlukan sejumlah Sasaran Program (SP) yang akan dicapai pada tahun 2020-2024.

Tabel 2. 2 Program dan Sasaran Program (SP) Direktorat SMA Tahun 2020-2024

No	Tujuan Kemdikbudristek	Sasaran Strategis (SS)	Program	Sasaran Program (SP)
1	Perluasan akses pendidikan bermutu bagi peserta didik	Meningkatnya pemerataan layanan	Program PAUD dan	Meningkatnya partisipasi pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah

No	Tujuan Kemdikbudristek	Sasaran Strategis (SS)	Program	Sasaran Program (SP)
	yang berkeadilan dan inklusif	pendidikan bermutu di seluruh jenjang	Wajib Belajar 12 Tahun	
2	Penguatan mutu dan relevansi pendidikan yang berpusat pada perkembangan peserta didik yang berkarakter	Meningkatnya kualitas pembelajaran (kompetensi dan karakter) serta relevansi di seluruh jenjang	Program Kualitas Pengajaran & Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya pencapaian perkembangan anak 2. Meningkatnya nilai asesmen kompetensi (literasi dan numerasi) satuan pendidikan 3. Meningkatnya kualitas dan kemanfaatan hasil asesmen untuk praktik pembelajaran 4. Meningkatnya internalisasi nilai penguatan karakter
3	Penguatan sistem tata kelola pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang partisipatif, transparan, dan akuntabel	Menguatnya tata kelola pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang partisipatif, transparan, dan akuntabel	Program Dukungan Manajemen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya akuntabilitas layanan dan pengelolaan anggaran pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi 2. Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi Kemdikbudristek

2.1.4 Perspektif Kebijakan Direktorat Sekolah Menengah Atas

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden, Direktorat SMA sebagai bagian dari Kemdikbudristek perlu menyusun arah kebijakan, strategi, serta program dan kegiatan yang selaras. Oleh karena itu, dokumen Renstra menyajikan dua perspektif dalam pencapaiannya.

1. Perspektif Tujuan (Profil Pelajar Pancasila)

Profil Pelajar Pancasila sebagai elaborasi tujuan pendidikan nasional adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai - nilai Pancasila, dengan enam ciri utama: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global,

bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif seperti ditunjukkan oleh Gambar 2.1

Gambar 2. 1 Dimensi-Dimensi Profil Pelajar Pancasila



Enam ciri tersebut menunjukkan bahwa Profil Pelajar Pancasila tidak hanya fokus pada kemampuan kognitif saja tetapi juga pada sikap dan perilaku yang sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia dan berkewargaan global.

2. Perspektif Cara (Merdeka Belajar)

Bapak pendidikan Indonesia, Ki Hadjar Dewantara, menyatakan bahwa paradigma pendidikan yang memerdekakan memiliki 3 (tiga) ciri yaitu:

- a. **Tidak Hidup Terperintah**
Peserta didik belajar dengan kesadaran dari dalam diri sendiri, bukan karena paksaan atau perintah orang lain.
- b. **Berdiri Tegak karena Kekuatan Sendiri**
Peserta didik berdiri tegak karena kekuatan sendiri dan mampu menemukan cara dalam mengatasi kesulitan belajar.
- c. **Cakap Mengatur Hidupnya dengan Tertib**
Peserta didik mampu menilai tindakan dan kemajuan belajarnya sehingga dapat melakukan perbaikan untuk mencapai tujuan belajar.

Pada hakikatnya gagasan Ki Hadjar Dewantara yang kemudian disebut sebagai Merdeka Belajar, sejalan dengan konsep *self regulated learning* yang telah dikaji oleh beberapa ahli seperti Zimmerman; Boekaerts, Winne dan Hadwin, Pintrich; Efklides, serta Hadwin, Järvelä dan Miller (Panadero, 2017). *Self regulated learning* adalah keyakinan seseorang terhadap kapasitas dirinya dalam menentukan tindakan, pikiran dan perasaan yang mengarah pada pencapaian tujuan, sembari melakukan monitoring diri dan refleksi diri terhadap kemajuan dalam mencapai target.

Merdeka belajar menjadi semangat yang menjiwai keseluruhan arah kebijakan dan strategi bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Semangat merdeka belajar berarti menekankan murid, guru, orang tua, satuan pendidikan, daerah, komunitas pendidikan, yayasan pendidikan, dunia usaha, dan dunia industri serta pelaku pendidikan lainnya sebagai aktor yang otonom dan berdaya. Pelaku pendidikan berdaya mengembangkan praktik-praktik baik pembelajaran, manajemen pendidikan, dan kepemimpinan pendidikan yang perlu diperkuat dan ditularkan ke seluruh ekosistem pendidikan sehingga membentuk pembelajaran yang berkualitas.

Semangat merdeka belajar, membentuk lima pergeseran paradigma dalam kepemimpinan dan pengelolaan pendidikan, yaitu sebagai berikut:

- a. Semula mekanisme kontrol menjadi pemberdayaan melalui umpan balik. Mekanisme kontrol terbukti tidak selalu efektif serta dapat menimbulkan tekanan dan orientasi yang keliru. Dalam ekosistem yang berdampak, umpan balik yang berkelanjutan menjadikan semua pihak lebih berdaya.
- b. Semula arahan menjadi penguatan praktik baik di lapangan. Kepemimpinan pendidikan dengan semangat merdeka belajar tidak menjadikan instruksi sebagai satu-satunya bentuk komunikasi, akan tetapi kepemimpinan yang mendengarkan, memahami, dan mengenali praktik baik di lapangan. Upaya penguatan praktik baik akan menumbuhkan kepercayaan diri dan inisiatif pelaku pendidikan melakukan inovasi pembelajaran dan pendidikan.
- c. Semula apresiasi hanya bagi yang terbaik menjadi bagi semua kemajuan. Apresiasi hanya bagi yang terbaik dapat menimbulkan demotivasi bagi mereka yang merasa tidak berdaya. Semangat merdeka belajar mendorong pengelolaan pendidikan yang mengapresiasi semua kemajuan yang terjadi, bahkan untuk kemajuan kecil oleh satuan pendidikan kecil yang masih berusaha meningkatkan kualitas pembelajaran. Dengan semangat merdeka belajar ini, pelaku dalam ekosistem

pendidikan akan lebih aktif dan lebih merasa berdaya, di manapun posisinya saat ini.

- d. Semula kompetisi menjadi kolaborasi untuk kemajuan bersama. Semangat merdeka belajar tanpa meninggalkan kompetisi, tapi lebih menonjolkan nilai-nilai gotong royong dalam bentuk kolaborasi antarpihak. Dengan kolaborasi, akan lebih banyak energi dan dukungan bagi semua pelaku untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Pendidikan bukan hanya tanggung jawab satu dua pihak tapi tanggung jawab bersama demi masa depan anak bangsa.
- e. Semula berfokus pada peningkatan akses menjadi peningkatan kualitas dan keadilan pendidikan. Semangat merdeka belajar memperluas fokus pembangunan pendidikan pada peningkatan kualitas dan keadilan pendidikan. Hal ini mendorong lebih banyak kebijakan afirmatif dan asimetris untuk memastikan semua anak mendapatkan pembelajaran yang berkualitas.

Semangat merdeka belajar pada akhirnya selaras dengan arah kebijakan nasional yang terkait dengan otonomi daerah, otonomi kampus, dan manajemen berbasis sekolah. Semangat merdeka belajar mendorong penguatan semua pihak untuk menjadi otonom sehingga bisa mencapai tujuan pendidikan nasional dengan berpijak pada konteks satuan pendidikan dan daerah masing-masing.

2.2 Tata Nilai Direktorat Sekolah Menengah Atas (SMA)

Pelaksanaan misi dan pencapaian visi, tujuan dan sasaran memerlukan penerapan tata nilai yang sesuai dan mendukung. Tata nilai merupakan dasar sekaligus arah bagi sikap dan perilaku seluruh pegawai Direktorat SMA dalam menjalankan tugas membangun pendidikan dan kebudayaan. Berikut ini tata nilai yang menjadi fokus utama dalam Rencana Strategis Direktorat SMA Tahun 2020-2024:

1. Integritas

Pada nilai integritas terkandung makna keselarasan antara pikiran, perkataan, dan perbuatan. Sesuai dengan nilai integritas, pegawai Direktorat SMA diharapkan konsisten dan teguh dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan, terutama dalam hal kejujuran dan kebenaran dalam tindakan dan mengemban kepercayaan. Adapun indikator yang mencerminkan nilai integritas adalah:

- a. Konsisten dan teguh dalam menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dalam tindakan
- b. Jujur dalam segala tindakan
- c. Menghindari benturan kepentingan
- d. Berpikiran positif, arif, dan bijaksana dalam melaksanakan tugas dan fungsi
- e. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku
- f. Tidak melakukan tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme
- g. Tidak melanggar sumpah dan janji pegawai/jabatan
- h. Tidak melakukan perbuatan rekayasa atau manipulasi
- i. Tidak menerima pemberian (gratifikasi) dalam bentuk apapun di luar ketentuan

2. *Kreatif dan Inovatif*

Nilai kreatif dan inovatif bermakna memiliki daya cipta dan kemampuan untuk menciptakan hal baru yang berbeda dari yang sudah ada atau yang sudah dikenal sebelumnya, baik berupa gagasan, metode, atau alat. Indikator dari nilai kreatif dan inovatif adalah:

- a. Memiliki pola pikir, cara pandang, dan pendekatan yang variatif terhadap setiap permasalahan, serta mampu menghasilkan karya baru
- b. Selalu melakukan penyempurnaan dan perbaikan berkala dan berkelanjutan
- c. Bersikap terbuka dalam menerima ide-ide baru yang konstruktif
- d. Berani mengambil terobosan dan solusi dalam memecahkan masalah
- e. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam bekerja secara efektif dan efisien
- f. Tidak merasa cepat puas dengan hasil yang dicapai
- g. Tidak bersikap tertutup terhadap ide-ide pengembangan
- h. Tidak monoton.

3. *Inisiatif*

Inisiatif adalah kemampuan bertindak melebihi yang dibutuhkan atau yang dituntut dari pekerjaan. Pegawai Direktorat SMA sewajarnya melakukan sesuatu tanpa menunggu perintah lebih dahulu dengan tujuan untuk memperbaiki atau meningkatkan hasil pekerjaan serta menciptakan peluang baru atau menghindari timbulnya masalah. Indikator dari nilai inisiatif adalah:

- a. Responsif melayani kebutuhan stakeholder
- b. Bersikap proaktif terhadap kebutuhan organisasi

- c. Memiliki dorongan untuk mengidentifikasi masalah atau peluang dan mampu mengambil tindakan nyata untuk menyelesaikan masalah
- d. Tidak hanya mengerjakan tugas yang diminta oleh atasan
- e. Tidak sekedar mencari suara terbanyak. berlingkungan dari kegagalan. berargumentasi bahwa apa yang Anda lakukan telah disetujui oleh semua anggota tim.

4. *Pembelajar*

Pada nilai pembelajar terkandung ikhtiar untuk selalu berusaha mengembangkan kompetensi dan profesionalisme. Pegawai Direktorat SMA harus berkeinginan dan berusaha untuk selalu menambah dan memperluas wawasan, pengetahuan, dan pengalaman, serta mampu mengambil hikmah dan pelajaran atas setiap kejadian.

Indikator yang menunjukkan nilai pembelajar adalah:

- a. Berkeinginan dan berusaha untuk selalu menambah dan memperluas wawasan. pengetahuan. dan pengalaman
- b. Mengambil hikmah dari setiap kesalahan dan menjadikannya pelajaran
- c. Berbagi pengetahuan atau pengalaman dengan rekan kerja
- d. Memanfaatkan waktu dengan baik
- e. Suka mempelajari hal yang baru
- f. Rajin belajar atau bertanya atau berdiskusi

5. *Menjunjung Meritokrasi*

Nilai menjunjung meritokrasi berarti menjunjung tinggi keadilan dalam pemberian penghargaan bagi karyawan yang kompeten. Pegawai Direktorat SMA perlu memiliki pandangan yang memberi peluang kepada orang untuk maju berdasarkan kelayakan dan kecakapannya. Indikator yang mencerminkan nilai ini adalah:

- a. Berkompetisi secara profesional
- b. Memberikan kesempatan yang setara dalam mengembangkan kompetensi pegawai
- c. Memberikan penghargaan dan hukuman secara proporsional sesuai kinerja
- d. Tidak sewenang-wenang
- e. Tidak mementingkan diri sendiri
- f. Menduduki jabatan sesuai dengan kompetensinya
- g. Mendapatkan promosi bukan karena kedekatan/primordialisme

6. *Terlibat Aktif*

Nilai terlibat aktif bermakna senantiasa berpartisipasi dalam setiap kegiatan. Pegawai Direktorat SMA sudah semestinya senantiasa berusaha mencapai tujuan bersama serta memberikan dorongan agar pihak lain tergerak untuk menghasilkan karya terbaiknya.

Nilai terlibat aktif ini t dapat dilihat dari indikator:

- a. Terlibat langsung dalam setiap kegiatan untuk mendukung visi dan misi Kementerian
- b. Memberikan dukungan kepada rekan kerja
- c. Peduli dengan aktifitas lingkungan sekitar (tidak apatis)
- d. Tidak bersifat pasif. sekedar menunggu perintah

7. *Tanpa Pamrih*

Nilai tanpa pamrih memiliki arti bekerja dengan tulus ikhlas dan penuh dedikasi. Pegawai Direktorat SMA yang memiliki nilai tanpa pamrih maka tidak memiliki maksud yang tersembunyi untuk memenuhi keinginan dan memperoleh keuntungan pribadi. Selain itu, pegawai Direktorat SMA memberikan inspirasi, dorongan, dan semangat bagi pihak lain untuk senantiasa berusaha menghasilkan karya terbaiknya sesuai dengan tujuan bersama. Indikator nilai tanpa pamrih adalah:

- a. Penuh komitmen dalam melaksanakan pekerjaan
- b. Rela membantu pekerjaan rekan kerja lainnya
- c. Menunjukkan sikap 4S (senyum. sapa. sopan. dan santun)
- d. Tidak melakukan pekerjaan dengan terpaksa
- e. Tidak berburuk sangka kepada rekan kerja

Dalam lingkup pegawai Direktorat SMA, peningkatan internalisasi ketujuh nilai di atas semakin dirasakan urgensinya untuk memastikan pembangunan pendidikan dan kebudayaan sesuai dengan Visi Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024 yang didukung oleh kinerja Direktorat SMA secara prima.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi

Pembangunan pendidikan dasar dan menengah disusun berdasarkan dan merujuk kepada arah kebijakan nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024, Rencana Pembangunan Pendidikan Jangka Menengah (RPPJM), Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024, serta hasil evaluasi Renstra tahun 2015-2019, yang kemudian dituangkan dalam perencanaan lima tahunan yaitu Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Sekolah Menengah Atas Tahun 2020-2024. Renstra Dit. SMA menjadi dasar, pedoman, acuan dalam penyusunan program dan selanjutnya dijabarkan ke dalam kegiatan-kegiatan pembangunan pendidikan menengah. Rujukan-rujukan utama ini secara konsisten harus dapat dicermati, dianalisis dan dipertajam ke dalam Renstra Direktorat SMA agar tidak keliru dan dapat optimal dalam teknis pelaksanaannya sampai kepada pengelola kegiatan, dan juga output-output yang menjadi ujung tombak bagi pencapaian keberhasilan pelaksanaan kebijakan dan program.

3.1.1 Arah dan Kebijakan Strategi Nasional

Pembangunan akan berjalan efektif bila perencanaan Kementerian dan Lembaga dapat saling mendukung dan selaras. Untuk itu, Rencana Strategis Kemendikbudristek harus selalu mengacu pada arah kebijakan dan strategi nasional yang diatur dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional periode 2020-2024.

Dalam RPJMN 2020-2024, arah kebijakan dan strategi nasional dikelompokkan menjadi 7 (tujuh) agenda Pembangunan, yaitu sebagai berikut:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;

6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; dan

7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Dari ketujuh agenda tersebut, Kemdikbudristek memberikan dukungan pada agenda pembangunan 3, 4 dan 7.

3.1.2 Arah dan Kebijakan Strategi Direktorat SMA sebagai Penunjang Strategi Nasional

Arah kebijakan, strategi, dan program Direktorat SMA yang mendukung Strategi Nasional pada agenda pembangunan 3,4 dan 7 adalah sebagai berikut:

a. Agenda Pembangunan 3: Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing

Pembangunan Indonesia tahun 2020-2024 ditujukan untuk membentuk sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter. Kebijakan dan strategi yang berkaitan langsung dengan Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Kebijakan dan Strategi Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing

No	Arah Kebijakan dan Strategi Nasional	Sasaran Strategis	Sasaran Program
	Meningkatkan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas		
1	Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran	SS 2 Meningkatnya kualitas pembelajaran (kompetensi dan karakter) serta relevansi di seluruh jenjang	SP 1 Meningkatnya pencapaian perkembangan anak SP 2 Meningkatnya nilai asesmen kompetensi (literasi dan numerasi) satuan pendidikan SP 3 Meningkatnya internalisasi nilai penguatan karakter

No	Arah Kebijakan dan Strategi Nasional	Sasaran Strategis	Sasaran Program
2	Peningkatan pemerataan akses layanan pendidikan di semua jenjang dan percepatan pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun	SS 1 Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan bermutu di seluruh jenjang	SP 5 Meningkatnya partisipasi pendidikan menengah
3	Penguatan penjaminan mutu pendidikan untuk meningkatkan pemerataan kualitas layanan antar satuan pendidikan dan antarwilayah	SS 2 Meningkatnya kualitas pembelajaran (kompetensi dan karakter) serta relevansi di seluruh jenjang	SP 4 Meningkatnya kualitas dan kemanfaatan hasil asesmen untuk praktik pembelajaran
4	Peningkatan tata kelola pembangunan pendidikan, strategi pembiayaan, dan peningkatan efektivitas pemanfaatan anggaran pendidikan	SS 5 Menguatnya tata kelola pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang partisipatif, transparan, dan akuntabel	SP 6 Meningkatnya akuntabilitas layanan dan pengelolaan anggaran pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi
			SP 7 Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi Kemendikbudristek

b. Agenda Pembangunan 4: Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan harus pula meneguhkan Indonesia sebagai negara-bangsa majemuk, memiliki keragaman suku, adat-istiadat, budaya, bahasa, dan agama, yang membentuk satu kesatuan dalam keragaman: *Bhinneka Tunggal Ika*. Untuk memperkuat *Bhinneka Tunggal Ika*, kesadaran sebagai negara-bangsa yang majemuk harus ditanamkan sejak dini di dalam keluarga, diperkuat di dalam sistem pendidikan, dan terus dipupuk dan dirawat di dalam sistem sosial kemasyarakatan. Kebijakan dan strategi nasional yang berkaitan langsung dengan Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen sebagai berikut sebagai berikut:

Tabel 3. 2 Kebijakan dan Strategi Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

No	Arah Kebijakan dan Strategi Nasional	Sasaran Strategis	Sasaran Program
A	Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkuat Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern, dan Berkarakter		
1	Revolusi mental dalam sistem pendidikan untuk memperkuat nilai integritas, etos kerja, gotong royong, dan budi pekerti	SS 2 Meningkatnya kualitas pembelajaran (kompetensi dan karakter) serta relevansi di seluruh jenjang	SP 1 Meningkatnya pencapaian perkembangan anak
			SP 3 Meningkatnya internalisasi nilai penguatan karakter
2	Revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan untuk penguatan budaya birokrasi yang bersih, melayani, dan responsif	SS 5 Menguatnya tata kelola pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang partisipatif, transparan, dan akuntabel	SP 1 Meningkatnya akuntabilitas layanan dan pengelolaan anggaran pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi
			SP 2 Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi Kemendikbudristek
3	Pembinaan ideologi Pancasila, pendidikan kewargaan, wawasan kebangsaan, dan bela negara untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotisme	SS 2 Meningkatnya kualitas pembelajaran (kompetensi dan karakter) serta relevansi di seluruh jenjang	SP 3 Meningkatnya internalisasi nilai penguatan karakter
B	Peningkatan Literasi, Inovasi, dan Kreativitas		
1	Peningkatan budaya literasi	SS 2 Meningkatnya kualitas pembelajaran (kompetensi dan karakter) serta relevansi di seluruh jenjang	SP 2 Meningkatnya nilai asesmen kompetensi (literasi dan numerasi) satuan pendidikan
2	Penguatan institusi sosial penggerak literasi dan inovasi	SS 2 Meningkatnya kualitas pembelajaran (kompetensi dan karakter) serta relevansi di seluruh jenjang	SP 4 Meningkatnya kualitas dan kemanfaatan hasil asesmen untuk praktik pembelajaran

c. Agenda Pembangunan 7: Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian diperlukan aparatur negara yang profesional dan berintegritas tinggi melalui penerapan sistem merit yang sangat baik, penguatan kelembagaan melalui optimalisasi proses bisnis dan reformasi sistem akuntabilitas kinerja, serta transformasi pelayanan publik yang diwujudkan melalui strategi berikut:

Tabel 3. 3 Kebijakan dan Strategi Reformasi Birokrasi Dan Tata Kelola

No	Arah Kebijakan dan Strategi Nasional	Sasaran Strategis	Sasaran Program
Reformasi Birokrasi Dan Tata Kelola			
1	Penguatan manajemen ASN, melalui: penerapan manajemen talenta ASN, peningkatan penerapan Manajemen SDM berbasis sistem merit, dan penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional pada Kemendikbudristek	SS 5 Menguatnya tata kelola pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang partisipatif, transparan, dan akuntabel	SP 7 Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi Kemendikbudristek
2	Penataan kelembagaan dan proses bisnis, melalui: penataan kelembagaan instansi	SS 5 Menguatnya tata kelola pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang partisipatif, transparan, dan akuntabel	SP 7 Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi Kemendikbudristek
3	Reformasi sistem akuntabilitas kinerja, melalui: perluasan implementasi sistem integritas, penguatan pengelolaan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja organisasi, serta reformasi sistem perencanaan dan penganggaran	SS 5 Menguatnya tata kelola pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang partisipatif, transparan, dan akuntabel	SP 6 Meningkatnya akuntabilitas layanan dan pengelolaan anggaran pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi
			SP 7 Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi Kemendikbudristek

No	Arah Kebijakan dan Strategi Nasional	Sasaran Strategis	Sasaran Program
4	Transformasi pelayanan publik, melalui: pelayanan publik berbasis elektronik (e-service), penguatan pengawasan masyarakat atas kinerja pelayanan publik, penguatan ekosistem inovasi, dan penguatan pelayanan terpadu	SS 5 Menguatnya tata kelola pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang partisipatif, transparan, dan akuntabel	SP 6 Meningkatnya akuntabilitas layanan dan pengelolaan anggaran pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi

3.1.3 Arah dan Kebijakan Strategi Direktorat SMA Penunjang Strategi Kemdikbudristek

Arah kebijakan, strategi, dan program Direktorat SMA yang mendukung Strategi Kemdikbudristek adalah sebagai berikut:

a. Optimalisasi Angka Partisipasi Pendidikan

Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka optimalisasi angka partisipasi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah adalah semua anak usia 16-18 Tahun mendapatkan layanan pendidikan.

Strategi Direktorat SMA untuk mencapai kondisi tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan pemerataan kesempatan memperoleh layanan SMA melalui peningkatan kapasitas terpasang bagi daerah yang belum terlayani dan penyelenggaraan sekolah inklusi bagi anak berkebutuhan khusus;
- 2) Program afirmasi pemerataan kesempatan memperoleh layanan SMA untuk daerah 3T dan pencegahan anak rentan putus sekolah
- 3) Menyediakan dukungan pembiayaan pendidikan bagi siswa dari keluarga tidak mampu dan di daerah afirmasi di jenjang pendidikan menengah.

b. Peningkatan dan Pemerataan Kualitas dan Relevansi Pendidikan

Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka peningkatan dan pemerataan kualitas dan relevansi pendidikan adalah sebagai berikut:

- 1) Pelajar dengan kemampuan kognitif baik yang berperilaku sesuai jati diri bangsa Indonesia dan berkewargaan global;
- 2) Sistem penjaminan mutu pendidikan yang berkualitas.

Strategi Direktorat SMA untuk mencapai kondisi tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Pelajar dengan kemampuan kognitif baik yang berperilaku sesuai jati diri bangsa Indonesia dan berkewargaan global.
 - a) Melaksanakan program sekolah penggerak sebagai motor perubahan praktik pembelajaran;
 - b) Menyempurnakan kurikulum dan perangkat kurikulum memberikan ruang bagi satuan pendidikan untuk mengadaptasi kurikulum sesuai dengan kebutuhan, konteks, dan karakteristik daerah, sekolah, dan siswa;
 - c) Mengembangkan strategi pembelajaran yang berfokus pada penguatan kompetensi dasar siswa, seperti literasi, numerasi, dan karakter;
 - d) Menerapkan pembelajaran paradigma baru pada semua satuan pendidikan melalui pengimbasan sekolah penggerak ataupun penerapan secara mandiri;
 - e) Memperkuat digitalisasi pendidikan untuk mengakselerasi transformasi pendidikan, meningkatkan efisiensi serta meningkatkan literasi digital siswa dan guru;
 - f) Memperkuat pembelajaran yang mendorong penguatan karakter di semua satuan pendidikan;
 - g) Mengembangkan program penguatan iklim keamanan sekolah, inklusivitas, dan kebinekaan satuan pendidikan;
 - h) Memfasilitasi siswa berprestasi untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan membangun karier sesuai dengan bidangnya; dan
 - i) Melakukan pembinaan minat dan bakat bagi siswa berprestasi.

- 2) Sistem penjaminan mutu pendidikan yang berkualitas
 - a) Menerapkan asesmen nasional (Asesmen Kompetensi Minimum [AKM], survei karakter, dan survei lingkungan belajar) sebagai instrumen dalam mengukur kualitas hasil belajar;
 - b) Mengembangkan profil dan rapor pendidikan di tingkat daerah dan satuan pendidikan dengan menggunakan asesmen nasional dan data pendidikan;
 - c) Menguatkan pemanfaatan profil dan rapor pendidikan untuk mendukung penjaminan mutu dan akreditasi otomatis; dan
 - d) Menyusun rekomendasi kebijakan yang berbasis pada analisis data dan meta analisis dari berbagai bukti ilmiah untuk secara bertahap dan berkelanjutan menyempurnakan Standar Nasional Pendidikan untuk menangani isu pembangunan pendidikan di Indonesia.

c. Tata Kelola Pendidikan yang Partisipatif, Transparan, dan Akuntabel

Kondisi yang ingin dicapai dalam mewujudkan tata kelola pendidikan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel adalah sebagai berikut:

1) Tata Kelola Direktorat SMA yang akuntabel dan berkualitas;

Strategi Direktorat SMA untuk mencapai kondisi tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Penyempurnaan kerangka regulasi bidang pendidikan untuk memperkuat fokus pada mutu dan relevansi pendidikan serta penguatan otonomi satuan pendidikan;
- b) Memperkuat mekanisme perencanaan dan penganggaran yang berbasis pada monitoring pelaksanaan dan evaluasi dampak program;
- c) Memperkuat kerja sama dan sinkronisasi kebijakan pendidikan dengan kementerian/lembaga di pusat dan pemerintah daerah;
- d) Penguatan sistem pengawasan internal untuk meningkatkan kepatuhan dan integritas terhadap peraturan perundang-undangan;
- e) Memperkuat mekanisme pengelolaan dana transfer daerah bidang pendidikan yang lebih terkoordinasi dengan baik;
- f) Mengembangkan mekanisme pengelolaan sumber daya manusia Direktorat SMA yang berbasis mekanisme manajemen talenta.

2) Pelayanan Publik yang Prima

Strategi Direktorat SMA untuk mencapai kondisi tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi tata kelola seperti: otomatisasi persuratan, pengadaan barang dan jasa, dan proses kepegawaian;
- b) Memperkuat pengelolaan pembiayaan pendidikan untuk memaksimalkan kontribusi pembiayaan dalam pencapaian sasaran pendidikan di bidang akses dan mutu;
- c) Mengembangkan kerja sama dengan sektor swasta, masyarakat, dan mitra pembangunan untuk menumbuhkan penguatan pendanaan pendidikan.

3.1.4 Kerangka Regulasi

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis, beberapa rancangan regulasi yang diprioritaskan sesuai bidang tugas Direktorat SMA pada periode waktu tahun 2020-2024, adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 4 Kerangka Regulasi Pendidikan SMA Tahun 2020-2024

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian
1	Revisi UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional	Menyesuaikan substansi pengaturan dengan perkembangan pendidikan serta sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan lain
2	UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	Pembagian Pewenangan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Kota
3	Revisi PP dan Permendikbud turunan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional	Dengan adanya penyesuaian pada UU Nomor 20 Tahun 2003 maka peraturan pelaksanaan dari UU akan ikut menyesuaikan
4	PP No. 19 tahun 2005, yang telah dua kali diubah dengan PP 32 Tahun 2013 dan PP 13 tahun 2015.	Untuk memastikan layanan pendidikan diberikan memenuhi standar yang ditentukan
5	PP No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan	Dukungan dana masyarakat dimungkinkan sepanjang tidak melanggar aturan yang berlaku
6	PP 66 tahun 2010 Pasal 58 H Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan	PP tersebut mengenai Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan, termasuk SMA di dalamnya. Dalam aturan tersebut disebutkan bahwa Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kemampuan dan kewenangan masing-masing menanggung biaya investasi, biaya operasional, beasiswa, dan/atau bantuan biaya pendidikan bagi satuan pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai aturan.
7	Permendikbud No. 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.	SMA merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi. Oleh karena itu, pendirian, perubahan, dan penutupan satuan pendidikan SMA, merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi
8	Permendikbud No. 159 Tahun 2014 tentang Evaluasi Kurikulum	Evaluasi kurikulum tertuang dalam Permendikbud No. 159 Tahun 2014 tentang Evaluasi Kurikulum. Dalam praktiknya, Evaluasi Kurikulum dilakukan terhadap empat hal pokok, yakni (1) Evaluasi pengembangan Dokumen Kurikulum; (2) evaluasi Implementasi Kurikulum; (3) Evaluasi Hasil Kurikulum; dan (4) evaluasi

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian
		Dampak Kurikulum. Berdasarkan evaluasi terhadap keempat hal inilah diambil kebijakan perubahan kurikulum
9	Permendikbud No. 28 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah	Peraturan menteri tersebut merupakan salah satu payung hukum bagi satuan pendidikan dalam melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan di Satuan Pendidikan.
10	Permendikbud No. 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah	Komite Sekolah tidak diperkenankan melakukan pungutan
11	Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah	Aturan ini dikeluarkan sebagai amanat Undang-undang dan juga mengacu pada Standar Proses
12	Permendikbud No 20,21,22 dan 23 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, Standar Proses dan Standar Penilaian	Keempat peraturan menteri ini tidak dapat dilepaskan dari adanya upaya revisi Kurikulum 2013 yang saat ini sedang diterapkan di beberapa sekolah sasaran. Dengan kata lain, keempat peraturan menteri ini pada dasarnya merupakan landasan yuridis bagi penerapan kurikulum 2013 yang telah direvisi.
13	Permendikbud Nomor 14 tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru TK SD SMP SMA SMK dan Sederajat	Permendikbud Nomor 14 tahun 2018 ini bertujuan untuk merevitalisasi pelaksanaan PPDB pada satuan pendidikan formal agar berlangsung secara lebih objektif, akuntabel, transparan, nondiskriminatif, dan berkeadilan sehingga dapat meningkatkan akses layanan pendidikan.
14	Permendikbud Nomor 20 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018.	Beberapa perubahan yang dilakukan mengenai kuota peserta didik berdasarkan zona ditetapkan paling sedikit 80% dari daya tampung Sekolah. jalur prestasi paling banyak 15% dan Jalur perpindahan tugas orang tua/wali paling banyak 5%. Selain itu, Permendikbud ini juga menyatakan

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian
		calon peserta didik hanya dapat memilih satu jalur dari tiga jalur pendaftaran PPDB.
15	Permendikbud No. 43 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ujian yang diselenggarakan Satuan Pendidikan dan Ujian Nasional.	Penyelenggaraan UN adalah Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) bekerjasama dengan instansi terkait untuk mengukur pencapaian kompetensi lulusan

3.1.5 Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan adalah perangkat Direktorat SMA yang meliputi struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan aparatur sipil negara. Kerangka kelembagaan disusun dengan tujuan antara lain:

1. Meningkatkan koordinasi pelaksanaan bidang-bidang pembangunan sebagaimana terdapat dalam RPJMN sesuai dengan fungsi dan visi/misi Direktorat SMA;
2. Membangun struktur organisasi yang tepat fungsi, tepat proses dan tepat ukuran untuk menghindari duplikasi fungsi dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi Direktorat SMA dalam melaksanakan program-programnya; dan
3. Memperjelas ketatalaksanaan dan meningkatkan profesionalisme sumber daya aparatur.

Berikut ini adalah struktur organisasi dan anggaran berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi dari Direktorat Sekolah Menengah Atas berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2021 dan Permendikbud no. 11 tahun 2022 :



Gambar 3. 1 Struktur Organisasi Direktorat SMA

Fungsi Direktorat SMA berdasarkan pada Permendikbud 28 tahun 2021 dan Permendikbud no. 11 tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Direktorat SMA mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang sekolah menengah atas dan pendidikan layanan khusus pada sekolah menengah atas.

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat SMA menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang peserta didik, pembelajaran, sarana prasarana, tata kelola, dan penilaian pada sekolah menengah atas dan pendidikan layanan khusus pada sekolah menengah atas;
- 2) Penyusunan norma, prosedur, dan kriteria di bidang peserta didik, pembelajaran, sarana prasarana, tata kelola, dan penilaian pada sekolah menengah atas dan pendidikan layanan khusus pada sekolah menengah atas;
- 3) Pelaksanaan kebijakan penjaminan mutu di bidang peserta didik, pembelajaran, sarana prasarana, tata kelola, dan penilaian pada sekolah menengah atas dan pendidikan layanan khusus pada sekolah menengah atas;
- 4) Pelaksanaan kebijakan di bidang standar peserta didik, pembelajaran, sarana prasarana, tata kelola, dan penilaian pada sekolah menengah atas dan pendidikan layanan khusus pada sekolah menengah atas;
- 5) Fasilitasi penyelenggaraan di bidang peserta didik, pembelajaran, sarana prasarana, tata kelola, dan penilaian pada sekolah menengah atas dan pendidikan layanan khusus pada sekolah menengah atas;
- 6) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peserta didik, pembelajaran, sarana prasarana, tata kelola, dan penilaian pada sekolah menengah atas dan pendidikan layanan khusus pada sekolah menengah atas;
- 7) Penyiapan perumusan pemberian izin penyelenggaraan sekolah menengah atas yang diselenggarakan perwakilan negara asing atau lembaga asing dan sekolah menengah atas kerja sama yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan asing dengan lembaga pendidikan Indonesia;
- 8) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang sekolah menengah atas; dan
- 9) Pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat.

3.1.6 Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi internal Direktorat SMA merupakan upaya sistematis, terpadu, dan komprehensif untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) yang meliputi aspek kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas, pengawasan, dan pelayanan publik di lingkungan Direktorat SMA. Reformasi birokrasi dihadapkan pada upaya mengatasi masalah inefisiensi, inefektivitas, tidak profesional, tidak netral, tidak disiplin, tidak patuh pada aturan, rekrutmen ASN tidak transparan, belum ada perubahan paradigma (*mindset*), KKN yang masih terjadi di berbagai jenjang pekerjaan, abdi masyarakat yang belum sepenuhnya terwujud, pemerintahan belum akuntabel, transparan, partisipatif, dan kredibel, pelayanan publik belum berkualitas dan pelayanan publik prima (*mudah, murah, cepat, dan lebih baik*) belum sepenuhnya terbangun secara luas.

Sebagai unit kerja yang mengemban amanat dalam membangun SDM melalui peningkatan mutu pendidikan dan pemajuan kebudayaan dengan memperhitungkan capaian kinerja, potensi, dan permasalahan, Direktorat SMA berupaya mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang unggul dan berkarakter. Untuk itu, Program Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 diharapkan dapat mencapai SDM yang berkualitas, baik dari aspek jumlah, kompetensi (*hard competencies* dan *soft competencies*), maupun integritas; termasuk pula manajemen serta kinerja SDM yang tinggi. Sumber Daya Manusia aparatur merupakan elemen terpenting bagi instansi pemerintah yang berperan sebagai penggerak utama dalam mewujudkan visi dan misi serta tujuan. Mengingat begitu pentingnya SDM aparatur, maka manajemen SDM diperlukan untuk mengelolanya secara sistematis, terencana dan terpola agar tujuan yang diinginkan organisasi pada masa sekarang maupun yang akan datang dapat tercapai secara optimal. Oleh karena itu pula dalam reformasi birokrasi, aspek SDM aparatur menjadi aspek penting, sehingga perlu dilakukan penataan secara sistematis. Di samping aspek SDM aparatur, ketercapaian peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih baik, peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi, peningkatan profesionalisme sumber daya aparatur pemerintah, serta penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN di lingkungan Direktorat SMA juga merupakan hal yang sangat penting.

Direktorat SMA sebagai salah satu unit utama di lingkungan Kemdikbudristek, terus melanjutkan dan mengoptimalkan pelaksanaan reformasi birokrasi yang sudah berjalan baik, meliputi delapan area perubahan, yakni:

Tabel 3.5 8 (Delapan) Area Perubahan

No.	Area Perubahan	Indikator	Program Kegiatan
1.	Manajemen Perubahan	Indeks Kepemimpinan Perubahan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengembangan dan Penguatan nilai-nilai untuk meningkatkan komitmen dan implementasi perubahan (<i>reform</i>) b. Pembentukan tim kerja RBI di lingkungan Direktorat SMA c. Penguatan nilai integritas, perubahan pola pikir dan budaya kinerja d. Pengembangan dan Penguatan peran agen perubahan dan <i>role model</i> dengan dibentuknya tim agen perubahan di lingkungan Direktorat SMA e. Pengembangan budaya kerja dan cara kerja yang adaptif dalam menyongsong revolusi industri 4.0
2.	Penguatan Pengawasan	Maturitas SPIP	<ul style="list-style-type: none"> a. Pembentukan tim SPI dan SPIP di lingkungan Direktorat SMA b. Penyusunan rencana kerja SPI dan SPIP c. Penguatan Sistem Manajemen Konflik
3.	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	Nilai SAKIP	<ul style="list-style-type: none"> a. Perencanaan terintegrasi dan lintas sektor (<i>collaborative</i>) b. Implementasi manajemen kinerja berorientasi hasil
4.	Penguatan Kelembagaan	Indeks Kelembagaan	<ul style="list-style-type: none"> a. <i>Assessment</i> organisasi berbasis kinerja b. Restrukturisasi (penyederhanaan) kelembagaan berdasarkan hasil evaluasi
5.	Penguatan Tata Laksana	Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemanfaatan IT dalam tata kelola pemerintahan b. Implementasi Manajemen Kearsipan Modern dan Handal (dari manual ke digital)
6.	Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur	<ul style="list-style-type: none"> 1. Indeks Profesionalitas ASN 2. Indeks Merit System 3. Indeks Tata Kelola Manajemen ASN 	<ul style="list-style-type: none"> a. Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Kebutuhan Organisasi b. Pengembangan Pegawai berbasis Kompetensi c. <i>Assessment</i> Pegawai d. Penanaman nilai integritas melalui penghargaan pegawai dengan kinerja terbaik e. Analisis Kebutuhan Pelatihan Pegawai f. Pemetaan Kompetensi Pegawai sesuai dengan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ)
7.	Penguatan Peraturan Perundang-Undangan	1. Indeks Reformasi Hukum	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi (menghilangkan <i>overlapping</i> peraturan)

No.	Area Perubahan	Indikator	Program Kegiatan
		2. Indeks Kualitas Kebijakan	<ul style="list-style-type: none"> b. Deregulasi aturan yang menghambat birokrasi; c. Melakukan perencanaan kebijakan yang meliputi agenda setting dan formulasi kebijakan d. Melakukan evaluasi kemanfaatan kebijakan yang telah disusun
8.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	<ul style="list-style-type: none"> 1. Indeks Inovasi 2. Indeks Pelayanan Publik 	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyusunan dokumen standar pelayanan b. Penyusunan alur layanan publik c. Mengembangkan budaya pelayanan prima d. Penguatan kompetensi petugas pelayanan publik e. Penilaian terhadap pelayanan melalui survey dan analisis kepuasan pelanggan

Sumber : Draft Roadmap RBI Kemdikbudristek 2020-2024

Pada tahun 2021 Direktorat SMA telah ditetapkan sebagai Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI/WBK) dan berdasarkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja, tingkat penerapan akuntabilitas kinerja SAKIP tahun 2021, Direktorat SMA masuk dalam kategori A (rentang predikat terbaik AA s.d terbawah predikat D) nilai: 84,70 dengan interpretasi: memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel.

BAB IV TARGET KINERJA DAN TARGET PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

Target kinerja merupakan salah satu kunci keberhasilan program untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian dimaksud setiap sasaran strategis dan program diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Program.

Tabel 4. 1 Sasaran Strategis, Indikator, dan Target Kinerja Direktorat Jenderal PAUD, Dikdas dan Dikmen

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Satuan	Baseline	Target		
			2020	2022	2023	2024
SP	Meningkatnya partisipasi pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah					
IKP 1.1.1	Persentase Kab/Kota dengan Angka Kesiapan Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 3-6 tahun di atas 75	%	63,42	63,81	64,20	64,59
IKP 1.2.1	Persentase Kab/kota dengan Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12 tahun di atas 99%	%	76,85	77,82	78,40	76,85
IKP 1.3.1	Persentase Kab/Kota dengan Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15 tahun di atas 95%	%	66,73	68,48	68,68	69,26
IKP 1.4.1	Persentase provinsi dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/SMLB/MA/Sederajat di atas 95%	%	11,76	20,59	23,53	26,47
SP	Meningkatnya pencapaian perkembangan anak					
IKP 2.1.1	Persentase Kab/kota yang menyediakan layanan PAUD HI	%	9,73	29,19	38,92	48,64
SP	Meningkatnya nilai asesmen kompetensi (literasi dan numerasi) satuan pendidikan					
IKP 2.2.1	Jumlah satuan pendidikan yang menjadi sekolah penggerak	Sekolah	-	9.100	14.100	19.100

IKP 2.2.2	Persentase satuan pendidikan yang menerapkan pembelajaran paradigma baru	%	-	2,14	3,32	4,49
SP	Meningkatnya kualitas dan kemanfaatan hasil asesmen untuk praktik pembelajaran					
IKP 2.2.7	Persentase satuan pendidikan yang memanfaatkan profil dan rapor pendidikan untuk mendukung perbaikan pembelajaran	%	-	25	50	75
SP	Meningkatnya internalisasi nilai penguatan karakter					
IKP 2.3.1	Persentase satuan pendidikan yang memiliki skor karakter peserta didik pada kategori baik	%	50	51	52	53
SP	Meningkatnya akuntabilitas layanan dan pengelolaan anggaran pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi					
IKP 5.3.6	Predikat SAKIP Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen	Predikat	A	A	A	A
SP	Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi Kemendikbudristek					
IKP 5.4.4	Jumlah Satker di Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM	Satker	13	14	15	16

Untuk mencapai sasaran-sasaran strategis tersebut, telah ditetapkan 7 (tujuh) sasaran program pada tahun 2021-2024.

Tabel 4. 2 Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Direktorat Jenderal PAUD, Dikdas dan Dikmen

Nama Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program
1. Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun		
	1 Meningkatnya partisipasi pendidikan anak usia dini, dasar dan menengah	1.1.1 Persentase Kab/Kota dengan Angka Kesiapan Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 3-6 tahun di atas 75 1.2.1 Persentase Kab/kota dengan Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12 tahun di atas 99% 1.3.1 Persentase Kab/Kota dengan Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15 tahun di atas 95% 1.4.1 Persentase provinsi dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/SMLB/MA/Sederajat di atas 95%
2. Program Kualitas Pengajaran & Pembelajaran		
	1 Meningkatnya pencapaian perkembangan anak	2.1.1 Persentase Kab/kota yang menyediakan layanan PAUD HI
	2 Meningkatnya nilai asesmen kompetensi (literasi dan numerasi) satuan pendidikan	2.2.1 Jumlah satuan pendidikan yang menjadi sekolah penggerak 2.2.2 Persentase satuan pendidikan yang menerapkan pembelajaran paradigma baru
	3 Meningkatnya kualitas dan kemanfaatan hasil asesmen untuk praktik pembelajaran	2.2.7 Persentase satuan pendidikan yang memanfaatkan profil dan rapor pendidikan untuk mendukung perbaikan pembelajaran
	4 Meningkatnya internalisasi nilai penguatan karakter	2.3.1 Persentase satuan pendidikan yang memiliki skor karakter peserta didik pada kategori baik

Nama Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program
3. Program Dukungan Manajemen		
	1 Meningkatnya akuntabilitas layanan dan pengelolaan anggaran pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi	5.3.6 Predikat SAKIP Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen
	2 Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi Kemdikbudristek	5.4.5 Jumlah Satker di Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM

Direktorat SMA sebagai unit teknis di lingkungan Ditjen Paudasmen dalam mendukung ketercapaian target dalam Sasaran Strategis dan Sasaran Program memiliki Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagai berikut:

Tabel 4. 3 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat SMA Tahun 2020-2021

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran kegiatan/Indikator (IKSS, IKP, IKK)	Satuan	Target	
			2020	2021
5627	Pembinaan Sekolah Menengah Atas			
SK	Tersedianya layanan pendidikan SMA yang merata dan berkualitas			
IKK	Jumlah kab/kota dengan APK SMA/MA/SMLB sekurang-kurangnya 95%	kab/kota	219	229
IKK	Jumlah SMA yang menjadi Sekolah Penggerak	sekolah	-	650
IKK	Persentase SMA yang memiliki nilai kinerja sekolah (<i>scorecard</i>) minimal 75 (kategori Sangat Tinggi)	%	-	5
IKK	Persentase siswa SMA dengan nilai Asesmen Kompetensi (Literasi) memenuhi kompetensi minimum	%	53	55
IKK	Persentase siswa SMA dengan nilai Asesmen Kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum	%	26,50	27,40

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Sasaran kegiatan/Indikator (IKSS, IKP, IKK)	Satuan	Target	
			2020	2021
IKK	Persentase SMA yang menggunakan peralatan TIK (komputer) dalam proses pembelajaran	%	73,84	76,06
IKK	Persentase SMA yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter	%	30	35
IKK	Persentase data pokok pendidikan SMA yang akurat, terbaru dan berkelanjutan	%	95,10	96

Tabel 4. 4 Target IKK Direktorat SMA Tahun 2022 - 2024

Kode	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan/Indikator	Satuan	Baseline 2020	Target		
				2022	2023	2024
4462	Peningkatan Kualitas Pembelajaran SMA					
SK	Meningkatnya pembelajaran Sekolah Menengah Atas yang berkualitas					
IKK 2.2.1.4	Jumlah SMA Penggerak	Lembaga	-	980	1.458	1.936
IKK 2.2.2.4	Persentase SMA yang menerapkan pembelajaran paradigma baru	%	-	7,01	10,43	13,85
IKK 2.2.7.7	Persentase SMA yang mendapatkan pembinaan peningkatan mutu pembelajaran	%	-	7,01	10,43	13,85
IKK 2.2.7.8	Persentase SMA yang menggunakan perangkat pendidikan untuk mendukung proses pembelajaran berkualitas	%	79,43	91,88	95,78	99,68
SK	Meningkatnya internalisasi nilai penguatan karakter Peserta didik Sekolah Menengah Atas					
IKK 2.3.1.3	Persentase SMA yang memiliki skor karakter peserta didik pada kategori baik	%	65	66	67	68
5627	Pembinaan Sekolah Menengah Atas					
SK	Tersedianya layanan pendidikan SMA yang merata dan berkualitas					

Kode	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan/Indikator	Satuan	Baseline 2020	Target		
				2022	2023	2024
IKK 1.4.1.1	Jumlah SMA menerima program afirmasi	Lembaga	-	185	208	220

4.2 Kerangka Pendanaan

Upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan, diperlukan dukungan berbagai macam sumber daya, dukungan dan prasarana yang memadai, dukungan regulasi, dan tentunya sumber pendanaan yang cukup. Sehubungan dengan dukungan pendanaan, indikasi kebutuhan pendanaan untuk mencapai tujuan program Direktorat SMA sampai dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 5 Kerangka Pendanaan Rencana Strategis Direktorat SMA Tahun 2021-2024

No	Program	Indikasi Kebutuhan Pendanaan				Jumlah
		(Juta Rp)				
		2021	2022	2023	2024	
1	Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun	211.690	41.553	87.487	91.861	432.591
2	Program Kualitas Pembelajaran	116.939	74.503	169.868	178.361	539.671
3	Program Dukungan Manajemen	25.108	26.035	28.828	30.269	110.240
Jumlah		353.737	142.091	286.183	300.492	1.082.502

Dalam mencapai target indikator diperlukan adanya definisi operasional untuk membantu dalam perhitungannya. Definisi Operasional untuk mendukung ketercapaian target Sasaran Program di lingkungan Ditjen Paudasmen dan target Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) pada Direktorat SMA adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 6 Defini Operasional Target Sasaran Program Ditjen Pauddasmen

Kode	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Metode Perhitungan	Indikator Keberhasilan	sumber data
SS 1	Meningkatnya Pemerataan Layanan Pendidikan di Seluruh Jenjang				
IKSS 1.4	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/SMLB /Sederajat	persentase perbandingan jumlah penduduk yang bersekolah pada SMA/SMK/SMLB/MA/Sederajat, negeri maupun swasta) terhadap jumlah penduduk usia 16-18 tahun	$(\sum \text{peserta didik SMA/SMK/MA/SMLB /Sederajat} / \sum \text{penduduk usia 16-18 th}) \times 100\%$	Meningkatnya APK SMA/SMK/SMLB/MA/ sederajat mendekati angka 100%	Badan Pusat Statistik (BPS)
SS 2	Meningkatnya kualitas pembelajaran (kompetensi dan karakter) dan relevansi di seluruh jenjang				
IKSS 2.2	Proporsi peserta didik yang memiliki nilai di atas batas minimum dalam asesmen kompetensi minimum, Literasi dan numerasi	Pada AN, AKM mengukur dua macam literasi, yaitu Literasi Membaca (Baca: Literasi) dan Literasi Matematika (Baca: Numerasi). Keduanya dipilih karena merupakan kemampuan atau kompetensi yang mendasar dan diperlukan oleh semua peserta didik. Literasi dan numerasi juga merupakan kompetensi yang perlu dikembangkan secara lintas mata pelajaran	$\% = (\sum \text{responden siswa yg mencapai nilai minimum AKM}) / (\sum \text{siswa yang mengikuti AKM}) \times 100\%$	Meningkatnya persentase jumlah siswa yang mencapai nilai minimal literasi dan numerasi mendekati 100%	Inventori Data Hasil Asesmen Nasional
IKSS 2.3	Persentase satuan Pendidikan yang memiliki indeks karakter, indeks iklim keamanan sekolah, dan indeks inklusivitas dan kebinekaan pada kategori baik	Pada AN, survei karakter akan diberikan kepada peserta didik, sedangkan survei lingkungan belajar akan diberikan kepada peserta didik, guru, dan kepala satuan pendidikan	$(\sum \text{satuan pendidikan pada semua jenjang dengan indeks karakter, indeks iklim keamanan, serta indeks iklim inklusivitas dan kebinekaan pada kategori baik} / \sum \text{satuan pendidikan semua jenjang}) \times 100\%$	Meningkatnya persentase jumlah satuan pendidikan yang indeks karakter, iklim keamanan, inklusivitas, dan kebinekaan pada kategori baik mendekati 100%	Inventori Data Hasil Asesmen Nasional
SS 5	Meningkatnya tata kelola pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang partisipatif, transparan dan akuntabel				
IKSS 5.3	Predikat SAKIP Direktorat SMA	Akuntabilitas kinerja merupakan salah satu dari delapan program yang wajib dijalankan dalam Reformasi Birokrasi Internal (RBI). Penerapan akuntabilitas kinerja pada seluruh instansi pemerintah didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29	[Perencanaan Kinerja] + [Pengukuran kinerja] + [Pelaporan Kinerja] + [Evaluasi Kinerja]	Tercapainya Predikat SAKIP Direktorat SMA dengan nilai A	Surat Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah oleh

Kode	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Metode Perhitungan	Indikator Keberhasilan	sumber data
		Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)			KemenPA N-RB
IKSS 5.4	Indeks Reformasi Birokrasi Direktorat SMA	penyimpulan atas hasil penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi dilakukan dengan menjumlahkan angka tertimbang dari masing-masing komponen. Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen akan dipergunakan untuk menentukan tingkat pelaksanaan reformasi birokrasi	Nilai PMRPB = (60% x Komponen Pengungkit) + (40% x komponen hasil)	Meningkatnya indeks reformasi Direktorat SMA mendekati angka 100	Surat Menteri PANRB tentang hasil PMPRB
SP	Meningkatnya partisipasi pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah				
IKP 1.4.1	Persentase provinsi dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/SMLB/MA/Sederajat diatas 95%	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/SMLB/MA/ sederajat merupakan persentase perbandingan jumlah penduduk yang bersekolah pada SMA/SMK/SMLB/MA/ sederajat, negeri maupun swasta) terhadap jumlah penduduk usia 16-18 tahun.	$(\sum \text{Provinsi Yang memiliki APK SMA/SMK/SMLB/Sederajat diatas 95\%}) / (\sum \text{Total Provinsi di Indonesia}) \times 100 \%$	Meningkatnya persentase provinsi dengan penduduk usia sekolah 16-18 tahun bersekolah di SMA/ sederajat di atas persentase 95 mendekati 100%	Badan Pusat Statistik (BPS)
SP	Meningkatnya nilai asesmen kompetensi (literasi dan numerasi) satuan pendidikan				
IKP 2.2.1	Jumlah satuan pendidikan yang menjadi sekolah penggerak	Sekolah Penggerak merupakan katalis untuk mewujudkan visi pendidikan Indonesia. Visi Pendidikan Indonesia yaitu mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang bernalar kritis; kreatif; mandiri; beriman bertakwa kepada Tuhan YME dan berakhlak mulia; bergotong royong dan berkebinekaan global.	\sum satuan pendidikan yang ditetapkan menjadi sekolah penggerak sesuai SK yang telah diterbitkan	Meningkatnya jumlah satuan pendidikan penggerak mendekati jumlah seluruh satuan pendidikan	Database Sekolah Penggerak
IKP 2.2.2	Persentase satuan pendidikan yang menerapkan pembelajaran paradigma baru	Jumlah satuan pendidikan yang menggunakan kurikulum yang disesuaikan dengan tujuan untuk mengembangkan dan menguatkan kompetensi dan karakter yang sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila. Kurikulum paradigma baru tersebut akan mulai digunakan di Sekolah Penggerak, yang selanjutnya akan terus bertambah untuk dikembangkan pada satuan pendidikan lainnya.	$(\sum \text{satuan pendidikan yang menerapkan pembelajaran paradigma baru}) / (\sum \text{satuan pendidikan}) \times 100 \%$	Meningkatnya persentase satuan pendidikan yang menerapkan pembelajaran paradigma baru mendekati 100%	Dapodik, BSKAP

Kode	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Metode Perhitungan	Indikator Keberhasilan	sumber data
SP	Meningkatnya kualitas dan kemanfaatan hasil asesmen untuk praktik pembelajaran				
IKP 2.2.7	Persentase satuan pendidikan yang memanfaatkan profil dan rapor pendidikan untuk mendukung perbaikan pembelajaran	Pemanfaatan profil dan rapor pendidikan oleh satuan pendidikan digunakan untuk mengevaluasi secara keseluruhan proses belajar mengajar antara guru dan peserta didik yang didukung dengan sarana dan prasana yang ada di sekolah. Selain itu, profil dan rapor pendidikan akan digunakan oleh satuan pendidikan dalam memfasilitasi perencanaan penganggaran, pelaksanaan pembelajaran dan penatausahaan di sekolah	$(\Sigma \text{satuan pendidikan yang memanfaatkan profil dan rapor pendidikan untuk mendukung perbaikan pembelajaran} / \Sigma \text{seluruh satuan pendidikan}) \times 100 \%$	Meningkatnya persentase satuan pendidikan memanfaatkan profil dan rapor pendidikan untuk mendukung perbaikan pembelajaran mendekati 100%	Profil dan Rapor Pendidikan
SP	Meningkatnya internalisasi nilai penguatan karakter				
IKP 2.3.1	Persentase satuan pendidikan yang memiliki skor karakter peserta didik pada kategori baik	Kegiatan-kegiatan di satuan pendidikan yang menunjang untuk melatih kepemimpinan, kepribadian dan pengembangan budi pekerti peserta didik melalui kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler dengan melibatkan para pemangku kepentingan berdasarkan hasil penilaian dari survei karakter	$(\Sigma \text{satuan pendidikan yang memiliki skor karakter peserta didik pada kategori baik} / \Sigma \text{satuan pendidikan}) \times 100 \%$	Meningkatnya persentase satuan pendidikan yang memiliki skor karakter peserta didik pada kategori baik mendekati 100%	Inventori Data Hasil Asesmen Nasional
IKP 5.3.6	Predikat SAKIP Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen	Berdasar Perpres 29 th 2014: SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah	Nilai SAKIP = [Perencanaan Kinerja] + [Pengukuran kinerja] + [Pelaporan Kinerja] + [Evaluasi Kinerja]	Meningkatnya nilai dan predikat SAKIP	Laporan hasil evaluasi SAKIP

Tabel 4. 7 Defisini Operasional Target Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Dit. SMA

Kode	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Metode Perhitungan	Indikator Keberhasilan	sumber data
SK	Tersedianya layanan pendidikan SMA yang merata dan berkualitas				
IKK 1.4.1.1	Jumlah SMA menerima program afirmasi	Kebijakan afirmasi pendidikan merupakan momentum awal untuk tercapainya cita-cita akses	$\Sigma \text{Satuan Pendidikan jenjang SMA yang menerima Program Afirmasi}$	Tersalurkannya program afirmasi ke satuan SMA yang berhak mendapatkan	APBN

Kode	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Metode Perhitungan	Indikator Keberhasilan	sumber data
		pendidikan yang berkeadilan. Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai amanat konstitusi tidak akan pernah tercipta jika pendidikan hanya dinikmati oleh mereka di daerah yang dekat dengan pusat. Program afirmasi ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antara pusat dan daerah. Perhitungan dilakukan pada jenjang SMA			
SK	Meningkatnya pembelajaran SMA yang berkualitas				
IKK 2.2.1.4	Jumlah SMA Penggerak	SMA Penggerak merupakan katalis untuk mewujudkan visi pendidikan Indonesia. Visi Pendidikan Indonesia yaitu mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang bernalar kritis; kreatif; mandiri; beriman bertakwa kepada Tuhan YME dan berakhlak mulia; bergotong royong dan berkebinekaan global	\sum satuan pendidikan SMA Penggerak sesuai SK yang telah terbit	Meningkatnya jumlah SMA penggerak mendekati jumlah seluruh SMA	Database Sekolah Penggerak
IKK 2.2.2.4	Persentase SMA yang menerapkan pembelajaran paradigma baru	Jumlah SMA penggerak yang menggunakan kurikulum yang disesuaikan dengan tujuan untuk mengembangkan dan menguatkan kompetensi dan karakter yang sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila. Kurikulum paradigma baru tersebut akan mulai digunakan di Sekolah Penggerak, yang selanjutnya akan terus bertambah untuk dikembangkan pada satuan pendidikan lainnya	$(\sum \text{Jumlah SMA yang menerapkan pembelajaran paradigma baru} / \sum \text{seluruh satuan pendidikan SMA}) \times 100\%$	Meningkatnya persentase satuan SMA yang menerapkan pembelajaran paradigma baru mendekati 100%	Dapodik
IKK 2.2.2.7	Persentase SMA yang mendapatkan pembinaan	SMA yang didampingi dalam meningkatkan mutu pembelajaran untuk peningkatan mutu	$(\sum \text{SMA yang mendapatkan pembinaan peningkatan mutu pembelajaran} / \sum$	Meningkatnya persentase satuan SMA yang mendapatkan pembinaan peningkatan	Laporan Internal Dit SMA

Kode	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Metode Perhitungan	Indikator Keberhasilan	sumber data
	peningkatan mutu pembelajaran	pendidikan daerah melalui profil dan rapor pendidikan daerah. Pendampingan dilakukan dengan menyiapkan langkah identifikasi hasil rapor, melakukan sosialisasi dan advokasi kepada pemda dan bersama pemda melakukan supervisi, monitoring dan evaluasi ke beberapa sekolah untuk mengetahui kendala yang dialami pada saat implementasi	seluruh satuan pendidikan SMA) x 100 %	mutu pembelajaran mendekati 100%	
IKK 2.2.7.8	Persentase SMA yang menggunakan perangkat pendidikan untuk mendukung proses pembelajaran berkualitas	Perbandingan jumlah satuan pendidikan SMA yang memiliki peralatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dan digunakan dalam pembelajaran. Yang termasuk dalam TIK tidak hanya komputer namun semua alat yang menunjang teknologi informasi dan komunikasi yang dapat digunakan untuk menunjang proses belajar mengajar termasuk kelengkapannya. Data penggunaan TIK tersebut dalam kegiatan belajar mengajar didapat dari sejumlah data pengisian pada Dapodik	$(\sum \text{SMA yang menggunakan perangkat pendidikan untuk mendukung proses pembelajaran} / \sum \text{seluruh satuan pendidikan SMA}) \times 100 \%$	Meningkatnya persentase satuan SMA yang menggunakan perangkat pendidikan untuk mendukung proses pembelajaran mendekati 100%	Dapodik
SK	Meningkatnya internalisasi nilai penguatan karakter Peserta didik SMA				
IKK 2.3.1.3	Persentase SMA yang memiliki skor karakter peserta didik pada kategori baik	Indeks karakter menunjukkan tingkat/ukuran karakter peserta didik dari suatu SMA tertentu yang dinilai berdasarkan 6 dimensi karakter Profil Pelajar Pancasila. SMA dinilai mempunyai indeks karakter baik apabila SMA tersebut berada pada level membudaya	$(\sum \text{satuan pendidikan pada jenjang SMA dengan indeks karakter pada kategori baik} / \sum \text{seluruh satuan pendidikan pada jenjang SMA}) \times 100 \%$	Meningkatnya persentase satuan SMA yang memiliki skor karakter peserta didik pada kategori baik mendekati 100%	Inventori data hasil AN

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Direktorat SMA Tahun 2020-2024 ini merupakan penyesuaian renstra Direktorat SMA Tahun 2020-2024 sebelumnya, disusun dalam rangka mendukung terwujudnya pembangunan Sumber Daya Manusia yang unggul dan berkarakter yang menjadi mandat Direktorat SMA.

Renstra ini disusun untuk membawa perubahan dalam rangka: (1) penekanan fokus pada mutu dan relevansi pendidikan yang berpusat pada perkembangan peserta didik; (2) pengembangan karakter peserta didik; (3) penekanan pada perluasan akses pendidikan bermutu, terutama melalui afirmasi yang berkeadilan dan inklusif; dan (4) penguatan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pendidikan sekaligus penguatan peran Direktorat SMA yang memiliki mandat menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria untuk diikuti oleh pemerintah daerah selaku pelaksana layanan pendidikan dasar dan menengah.

Renstra ini menjabarkan visi Direktorat SMA beserta sasaran program, arah kebijakan dan strategi untuk mencapai sasaran program yang ditargetkan. Dengan demikian Renstra ini menggambarkan secara jelas keterkaitan antara sasaran program, dan sasaran kegiatan, serta dilengkapi dengan indikator keberhasilannya guna mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pemanfaatan APBN.

Penyesuaian Rencana Strategis (Renstra) Direktorat SMA ini diharapkan untuk digunakan sebagai pedoman dan arah pembangunan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang hendak dicapai pada periode 2020 – 2024. Selain itu Renstra ini merupakan dasar dan acuan ataupun sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan di bidang pendidikan menengah.

Selain yang diuraikan di atas, Rencana Strategis (Renstra) Direktorat SMA ini diharapkan bisa dipahami serta dimanfaatkan seluruh masyarakat, khususnya para pemangku kepentingan. Dengan demikian, banyak pihak dapat terlibat aktif secara efektif dan konstruktif dalam kegiatan pembangunan Pendidikan Menengah. Pelibatan publik secara lebih aktif dan terintegrasi diharapkan mampu meningkatkan hasil pembangunan bidang Pendidikan Menengah, selama lima tahun mendatang yang hasilnya bisa dirasakan oleh masyarakat seluruh Indonesia.



Direktorat SMA



Direktorat SMA



@dir_sma



direktorat_sma